

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LKj IP)**



**DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN
DAN PERIKANAN
KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban Tahun 2025 dapat tersusun dengan baik. LKj IP ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan bentuk pertanggungjawaban tertulis atas pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025, sekaligus sebagai media evaluasi untuk mengukur sejauh mana target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dapat tercapai.

Tahun 2025 merupakan periode transisi sehingga laporan ini mengacu pada Dokumen Renstra tahun 2021-2025 dan Renstra tahun 2025-2029, dokumen Perubahan Renja 2025 serta Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Laporan ini berisi tentang gambaran perencanaan dan akuntabilitas kinerja yang menjelaskan capaian kinerja pada tahun bersangkutan, perbandingan capaian kinerja dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan organisasi lain (benchmark kinerja) serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja beserta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Kami menyadari bahwa keberhasilan yang telah dicapai merupakan hasil antara pemerintah daerah, maupun stake holder serta seluruh pemangku kepentingan. Di sisi lain, kami juga mengevaluasi berbagai hambatan yang muncul sebagai bahan perbaikan strategi di masa mendatang demi mewujudkan Kabupaten Tuban yang lebih sejahtera dan mandiri pangan.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga LKj IP ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan, serta menjadi sumber informasi bagi masyarakat luas.

Tuban, 26 Januari 2026

Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan Kabupaten
Tuban



EKO JULIANTO, S.STP, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19771001 199701 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Organisasi	2
1.3 Sumber Daya Manusia.....	16
1.4 Aspek Strategis serta Permasalahan Utama.....	17
1.5 Landasan Hukum	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA	25
2.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah.....	25
2.1.1 Renstra Tahun 2021-2026	25
2.1.2 Renstra Tahun 2025-2029	30
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	38
2.2.1 PK Tahun 2025 (Perencanaan Awal/Lama).....	38
2.2.2 Review/Perubahan PK Tahun 2025.....	40
2.2.3 Ringkasan Perubahan PK Tahun 2025	41
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	43
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	43
3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini	56
3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	58
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah (Target Akhir Renstra)	63

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Organisasi Lain yang Setipe/Provinsi/Nasional (Benchmark Kinerja)	64
3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	65
3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	69
3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja	85
3.2 Realisasi Anggaran.....	86
BAB IV PENUTUP	95
4.1 Kesimpulan.....	95
4.2 Rekomendasi Tindak Lanjut.....	95

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan.....	16
Tabel 1.2 Jumlah pegawai berdasarkan golongan	17
Tabel 2 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	29
Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban 2025-2029	37
Tabel 2.3 Target Kinerja Tahun 2025	38
Tabel 2.4 Pagu Anggaran tahun 2025	39
Tabel 2 5 Review/Perubahan PK Tahun 2025	40
Tabel 2.6 Alokasi Pagu Anggaran P-APBD 2025	41
Tabel 2.7 Ringkasan Perubahan PK Tahun 2025	42
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025 (berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 perencanaan awal/sebelum perubahan)	55
Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini	56
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	59
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah (Target Akhir Renstra).....	63
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Organisasi Lain yang Setipe/Provinsi/Nasional (Benchmark Kinerja)	65
Tabel 3.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	84
Tabel 3.7 Realisasi Anggaran tahun 2025	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 1 Susunan Organisasi DKP2P Kab. Tuban	16
Gambar 1 2 Susunan Organisasi UPTD DKP2P Kab. Tuban.....	16
 Gambar 2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD sebagai Acuan Penyusunan Renstra.	 31
 Gambar 3.1 Realisasi IKP tahun 2022-2025	 60
Gambar 3.2 Realisasi NTP Tahun 2022-2025.....	60
Gambar 3.3 Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2022-2024.....	61
Gambar 3.4 Realisasi PoU Kab. Tuban Tahun 2022-2025.....	61
Gambar 3.5 Nilai Tambah Produk Perikanan tahun 2022-2025	62
Gambar 3.6 IKM DKP2P Tahun 2023-2025.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan perwujudan komitmen pemerintah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*). Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian target strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban memegang peranan vital dalam struktur ekonomi daerah. Sebagai wilayah yang memiliki potensi agraris dan maritim yang kuat, Kabupaten Tuban dituntut untuk mampu menjaga kedaulatan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pelaku utamanya, yakni petani, peternak dan nelayan. Berdasarkan data evaluasi tahun 2025, sektor ini menghadapi dinamika yang kompleks, mulai dari fluktuasi harga komoditas hingga tantangan perubahan iklim yang memengaruhi pola tanam dan hasil tangkapan ikan.

LKj IP Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban Tahun 2025 ini disusun untuk menyajikan informasi kinerja yang terukur atas pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Laporan ini tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban administratif, namun juga berfungsi sebagai:

- Instrumen transparansi, yaitu memberikan gambaran yang jelas kepada publik mengenai penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai.
- Media evaluasi dengan mengidentifikasi hambatan dalam pencapaian target kinerja, seperti kendala teknis di lapangan maupun faktor eksternal lainnya.
- Dasar perencanaan dengan memberikan rekomendasi strategis untuk perbaikan kinerja pada tahun mendatang guna mendukung visi pembangunan Kabupaten Tuban.

Melalui laporan ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat melihat sejauh mana Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan telah menjalankan fungsinya dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alam demi ketahanan pangan yang berkelanjutan di Kabupaten Tuban.

1.2 Tugas, Fungsi dan Organisasi

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 50 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban menyebutkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dengan tipe A yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dan mempunyai tugas membantu Bupati dalam fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
- e. penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta program dan pelaporan;

- f. perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- g. perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
- h. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Ketahanan Pangan;
4. Bidang Sarana Pertanian;
5. Bidang Penyuluhan dan Prasarana Pertanian;
6. Bidang Kesehatan Hewan;
7. Bidang Perikanan;
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun uraian tugas dan fungsi masing-masing sebagai berikut:

A. Sekretariat

- 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta penyusunan program dan pelaporan.
- 3) Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan administrasi umum dan urusan rumah tangga;
 - b. penyelenggaraan urusan pembangunan, pemeliharaan dan pengamanan bangunan serta fasilitas kantor;
 - c. pelaksanaan tugas-tugas kehumasan dan keprotokolan;
 - d. pelaksanaan tugas-tugas yang menyangkut hukum dan ketatalaksanaan; pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - e. penyelenggaraan administrasi keuangan;

- f. pelaksanaan penyusunan program dan pelaporan;
 - g. pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan akuntabilitas kinerja;
 - h. penyelenggaraan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
 - i. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
 - j. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 4) Sekretaris membawahkan dan mengoordinasikan Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- 5) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, pembinaan di bidang administrasi umum, rumah tangga, kepegawaian serta pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah.
- 6) Dalam melaksanakan tugasnya, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan dan penyediaan bahan penyelenggaraan administrasi umum dan tata usaha, meliputi surat menyurat dan kearsipan;
 - b. penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan perjalanan dinas;
 - c. penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan penatausahaan kepegawaian;
 - d. penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
 - e. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier; penyiapan dan penyediaan terkait produk hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - f. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
 - g. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan

- h. pelaksanaan fungsi tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Bidang Ketahanan Pangan

- 1) Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan serta pelayanan administratif di bidang ketahanan pangan.
- 3) Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang ketahanan pangan;
 - b. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang ketahanan pangan;
 - c. pelaksanaan infrastruktur kemandirian pangan;
 - d. pelaksanaan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
 - e. pelaksanaan pengawasan keamanan dan penanganan kerawanan pangan;
 - f. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab bidang ketahanan pangan;
 - g. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
 - h. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Bidang Sarana Pertanian

- 1) Bidang Sarana Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Bidang Sarana Pertanian mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan

melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan serta pelayanan administratif di bidang sarana pertanian.

- 3) Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang sarana pertanian;
 - b. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang sarana pertanian;
 - c. pelaksanaan pengawasan penggunaan sarana pertanian;
 - d. pelaksanaan produksi, budidaya ternak dan pengawasan obat hewan;
 - e. pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
 - f. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab bidang sarana pertanian;
 - g. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
 - h. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. Bidang Penyuluhan dan Prasarana Pertanian

- 1) Bidang Penyuluhan dan Prasarana Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Bidang Penyuluhan dan Prasarana Pertanian mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan serta pelayanan administratif di bidang penyuluhan dan prasarana pertanian.
- 3) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penyuluhan dan Prasarana Pertanian menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang penyuluhan dan prasarana pertanian;

- b. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang penyuluhan dan prasarana pertanian;
- c. pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
- d. pelaksanaan pengelolaan lahan dan pengembangan prasarana pertanian;
- e. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana pertanian;
- f. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab bidang penyuluhan dan prasarana pertanian;
- g. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- h. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

E. Bidang Kesehatan Hewan

- 1) Bidang Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan serta pelayanan administratif di bidang kesehatan hewan.
- 3) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang kesehatan hewan;
 - b. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang kesehatan hewan;
 - c. pelaksanaan penjaminan kesehatan hewan;
 - d. pelaksanaan penerapan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;
 - e. pelaksanaan pengawasan distribusi dan teknis kesejahteraan hewan;

- f. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab bidang kesehatan hewan;
- g. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier; pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

F. Bidang Perikanan

- 1) Bidang Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Bidang Perikanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan serta pelayanan administratif di bidang perikanan.
- 3) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perikanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang perikanan;
 - b. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang perikanan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan perikanan tangkap;
 - d. pelaksanaan pengelolaan perikanan budidaya;
 - e. pelaksanaan pengawasan sumber daya perikanan dan pengelolaan hasil perikanan;
 - f. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab bidang perikanan;
 - g. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
 - h. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

G. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah

- 1) Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas.
- 2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 3) Unit Pelaksana Teknis terdiri atas 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional.
- 4) Unit Pelaksana Teknis Dinas Terdiri dari:
 - a. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan;
 - c. Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Tawar/Air Payau;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Produksi, Benih Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura;
- 5) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang Perikanan.
- 6) Dalam melaksanakan tugas, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan dan penyediaan bahan serta penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan produksi perikanan tangkap;
 - b. pelaksanaan peningkatan pengembangan manajemen mutu pengelolaan perikanan tangkap;
 - c. pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana Tempat Pelelangan Ikan;
 - d. pelaksanaan pengaturan dan penyelenggaraan pelelangan ikan;
 - e. pelaksanaan pengumpulan data informasi kelautan dan perikanan;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi Tempat Pelelangan Ikan meliputi bawahannya;
 - g. pelaksanaan urusan administrasi keuangan, perlengkapan, kepegawaian, dan jabatan fungsional;

- h. pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawab Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
 - i. melakukan pengawasan dan pengendalian serta pengelolaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawab Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
 - j. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
 - k. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 7) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- 8) Dalam melaksanakan tugas, Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan dan penyediaan bahan serta penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan kegiatan pusat kesehatan hewan dan inseminasi buatan;
 - b. pelaksanaan peningkatan pengembangan manajemen mutu pengelolaan pusat kesehatan hewan dan inseminasi buatan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan hewan dan inseminasi buatan;
 - d. penyusunan rencana kebutuhan, pemakaian dan pemeliharaan sarana dan prasarana pusat kesehatan hewan dan inseminasi buatan;
 - e. pelaksanaan konsultasi veteriner dan penyuluhan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - f. pelaksanaan urusan administrasi keuangan, perlengkapan, kepegawaian, dan jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawab Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan;

- h. penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan laporan bulanan, darurat dan insidentil;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pelayanan inseminasi buatan;
 - j. melakukan pengawasan dan pengendalian serta pengelolaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawab UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan;
 - k. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
 - l. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 9) Unit Pelaksana Teknis Daerah Perikanan Budidaya Air Tawar/Air Payau mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang perikanan dalam rangka peningkatan produksi dan mutu benih ikan.
- 10) Dalam melaksanakan tugas, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perikanan Budidaya Air Tawar/Air Payau menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan dan penyediaan bahan serta penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan produksi perbenihan ikan;
 - b. pelaksanaan peningkatan pengembangan manajemen mutu pengelolaan benih ikan air tawar;
 - c. pelaksanaan pengelolaan pengembangan teknologi budidaya air tawar serta kaji terap dan diseminasi teknologi air tawar;
 - d. pelaksanaan pengambilan, pengujian mutu dan rekomendasi kelayakan hasil perbenihan;
 - e. penyediaan produksi benih ikan air tawar dan ikan hias;
 - f. pelaksanaan pengumpulan data informasi produksi benih ikan air tawar dan ikan hias;
 - g. pelaksanaan urusan administrasi keuangan, perlengkapan, kepegawaian, dan jabatan fungsional;
 - h. pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawab Unit Pelaksana Teknis Daerah Perikanan Budidaya Air Tawar/Air Payau;

- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang budidaya ikan air tawar/payau;
 - j. melakukan pengawasan dan pengendalian serta pengelolaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawab Unit Pelaksana Teknis Daerah Perikanan Budidaya Air Tawar/Air Payau;
 - k. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
 - l. pelaksanaan laporan/pertanggung jawaban kepada Kepala Dinas; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 11) Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pemotongan hewan.
- 12) Dalam melaksanakan tugas, Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan dan penyediaan bahan serta penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan rumah potong hewan;
 - b. pelaksanaan peningkatan pengembangan manajemen mutu pengelolaan rumah potong hewan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan rumah potong hewan;
 - d. pelaksanaan pemeriksaan hewan sebelum dipotong
 - e. pelaksanaan pemotongan hewan secara halal
 - f. pelaksanaan pemeriksaan hewan setelah dipotong;
 - g. penyediaan daging Aman, Sehat, Utuh dan Halal;
 - h. pelaksanaan koordinasi teknis dan administrasi dengan bidang pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
 - i. pelaksanaan urusan administrasi keuangan, perlengkapan, kepegawaian, dan jabatan fungsional;
 - j. pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawab Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan;
 - k. pelaksanaan laporan bulanan insidental;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas;

- m. melakukan pengawasan dan pengendalian serta pengelolaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawab Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan;
 - n. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
 - o. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
 - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 13) Unit Pelaksana Teknis Daerah Produksi, Benih Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pengelolaan pembenihan tanaman pangan, perkebunan dan Hortikultura.
- 14) Dalam melaksanakan tugas, Unit Pelaksana Teknis Daerah Produksi, Benih Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan dan penyediaan bahan serta penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pembenihan, pembibitan, tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;
 - b. pelaksanaan peningkatan pengembangan manajemen mutu pengelolaan benih/bibit tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;
 - c. pelaksanaan standarisasi dan pemberian rekomendasi mutu benih/bibit tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan terhadap upaya pembenihan dan/atau pembibitan yang dilakukan oleh masyarakat;
 - e. pemberian bimbingan kepada petani terhadap pemanfaatan balai benih umum dan balai benih pokok;
 - f. penyiapan dan penyediaan bahan fasilitasi perijinan produk benih/bibit serta pengaturan penggunaan benih/bibit tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;
 - g. pelaksanaan urusan administrasi keuangan, perlengkapan, kepegawaian, dan jabatan fungsional;
 - h. pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawab Unit

Pelaksana Teknis Daerah Produksi, Benih Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura;

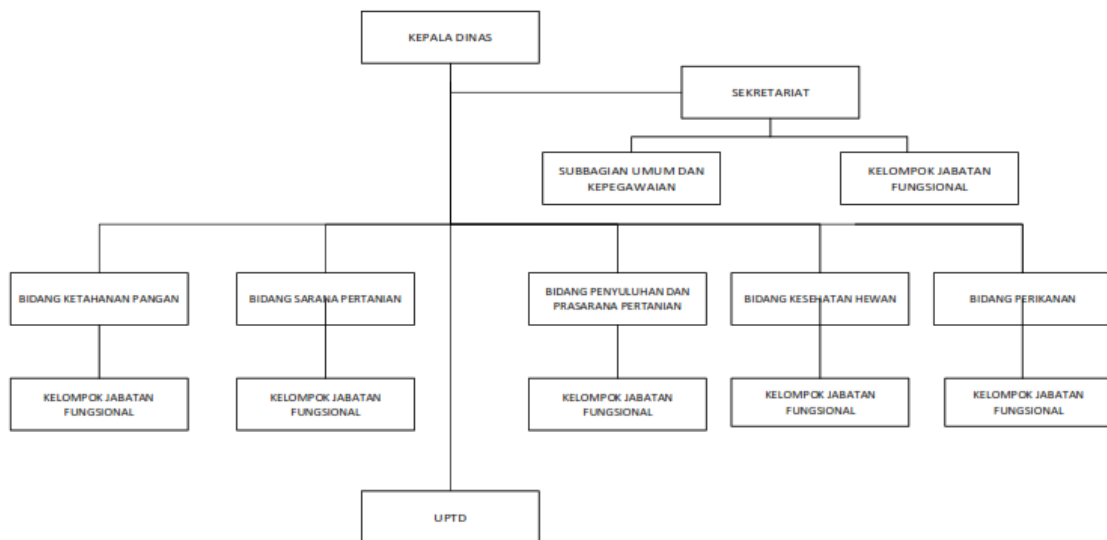
- i. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penangkar benih/bibit tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;
 - j. pengumpulan bahan dan penyusunan rencana teknis kegiatan pembenihan, pembibitan tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura kepada masyarakat;
 - k. melakukan pengawasan dan pengendalian serta pengelolaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Unit Pelaksana Teknis Daerah Produksi, Benih Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura;
 - l. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
 - m. pelaksanaan laporan/pertanggung jawaban kepada Kepala Dinas; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 15) Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, dan ketatausahaan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- 16) Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan dan penyediaan bahan perencanaan kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - b. penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan ketatausahaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - c. penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan ketatausahaan di Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - d. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
 - e. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

H. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

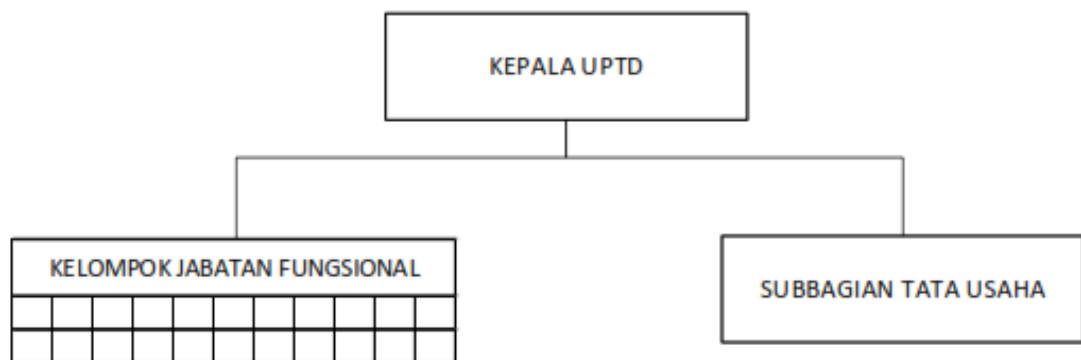
- 1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok terkait dengan bidang keahliannya.
- 2) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh pimpinan satuan organisasi.
- 3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Subbagian atau Kepala Bidang yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

I. TATA KERJA

- 1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Subbagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah dan kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- 2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.



Gambar 1 1 Susunan Organisasi DKP2P Kab. Tuban



Gambar 1 2 Susunan Organisasi UPTD DKP2P Kab. Tuban

1.3 Sumber Daya Manusia

Jumlah total sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban sampai akhir Desember sejumlah 228 orang, yang terdiri dari PNS sebanyak 88 orang dan PPPK sebanyak 140 orang.

Rincian berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Kategori	S3	S2	S1	D3	SMA	Total
PNS	1	10	52	10	15	88
PPPK	-	-	94	10	36	140
Jumlah	1	10	146	20	51	228

Tabel 1.1 Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

Golongan	IV	III	II	X	IX	VII	V
PNS	11	61	16	-	-	-	-
PPPK	-	-	-	9	85	9	37
Jumlah	11	61	16	9	85	9	37

Tabel 1.2 Jumlah pegawai berdasarkan golongan

1.4 Aspek Strategis serta Permasalahan Utama

Secara sistematis gambaran persoalan yang menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan sektor-sektor strategis tersebut dapat diuraikan berikut ini.

1. Urusan Pangan

Permasalahan dalam urusan pangan di Kabupaten Tuban berpusat pada ketahanan pangan wilayah, keberagaman konsumsi, distribusi pangan, dan pemanfaatan sarana pendukung. Meskipun Kabupaten Tuban dikenal sebagai salah satu daerah lumbung pangan, namun masih ditemukan wilayah dengan kategori rawan pangan. Hal ini mencerminkan masih lemahnya distribusi pangan, rendahnya daya beli masyarakat, serta keterbatasan akses fisik terhadap pangan.

Selain itu, tingkat konsumsi pangan masyarakat belum mencerminkan pola makan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA). Edukasi gizi masih terbatas, begitu pula ketersediaan pangan alternatif di tingkat rumah tangga. Fasilitas lumbung pangan masyarakat yang sudah tersedia pun banyak yang tidak termanfaatkan secara optimal akibat lemahnya pengelolaan, manajemen, dan tidak adanya pendampingan yang berkelanjutan.

Tidak kalah penting, data dan hasil kajian seperti *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA) yang telah disusun belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai dasar pengambilan kebijakan lintas sektor. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam integrasi data dan koordinasi antar-OPD, yang seharusnya menjadi fondasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program ketahanan pangan daerah.

2. Urusan Pertanian

Permasalahan pada sektor pertanian meliputi kesejahteraan petani yang masih rendah, rendahnya kontribusi pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), biaya produksi yang tinggi,

serta belum optimalnya pengelolaan nilai tambah produk hasil pertanian. Meski sektor ini menjadi tumpuan mata pencaharian sebagian besar penduduk Tuban, namun belum mampu secara signifikan meningkatkan taraf hidup petani.

Faktor penyebabnya antara lain adalah mahalnya input produksi seperti pupuk, benih, dan pestisida yang sebagian besar masih bergantung dari luar. Selain itu, belum adanya regulasi perlindungan lahan seperti Perda LP2B menyebabkan potensi konversi lahan produktif semakin besar. Petani juga masih menghadapi kesulitan dalam memasarkan hasil produksi mereka, baik karena keterbatasan akses pasar maupun rendahnya daya saing produk.

Minat generasi muda terhadap sektor pertanian juga semakin menurun. Hal ini disebabkan oleh citra pertanian yang dianggap tidak menjanjikan secara ekonomi, keterbatasan akses teknologi modern, dan kurangnya strategi regenerasi petani. Buruh tani, sebagai kelompok paling rentan, turut mengalami kondisi ekonomi yang memprihatinkan akibat rendahnya pendapatan dan minimnya program pemberdayaan.

Lemahnya branding, keterbatasan akses terhadap modal usaha, dan ketiadaan jaminan harga produk turut memperburuk kondisi sektor ini. Semua masalah ini berkelindan, menciptakan rantai hambatan yang harus segera diputus melalui pendekatan strategis dan kolaboratif lintas sektor.

3. Urusan Kelautan dan Perikanan

Meskipun cakupan wilayah pesisir Kabupaten Tuban cukup luas, sektor kelautan dan perikanan belum sepenuhnya memberikan kontribusi optimal terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan pembudidaya ikan. Permasalahan utama di sektor ini sangat mirip dengan sektor pertanian, yaitu tingginya biaya produksi, kesulitan akses pasar, rendahnya nilai tambah, dan keterbatasan modal usaha.

Nelayan dan pembudidaya ikan masih mengalami tantangan dalam mendapatkan input produksi seperti pakan, sarana tangkap, dan infrastruktur pendukung lainnya. Selain itu, fluktuasi harga hasil tangkapan/produksi yang tidak menentu serta tidak adanya skema jaminan harga membuat pendapatan mereka tidak stabil. Hal

ini menjadi tantangan tersendiri dalam mendorong sektor perikanan yang berkelanjutan.

Kesulitan dalam memasarkan hasil perikanan diperparah oleh lemahnya promosi dan branding produk, serta tidak adanya jaringan distribusi yang kuat. Keterbatasan akses informasi pasar menyebabkan pelaku sektor ini sulit bersaing, baik di pasar lokal maupun regional. Oleh karena itu, sektor kelautan dan perikanan membutuhkan intervensi yang tepat guna, termasuk penguatan kelembagaan pelaku usaha perikanan, dukungan kebijakan harga, dan fasilitasi pemasaran.

Pembangunan sektor ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan di Kabupaten Tuban menghadapi dinamika yang kompleks di tengah perubahan lingkungan strategis dan tantangan pembangunan daerah. Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban tahun 2025–2029, diperlukan strategi yang tidak hanya adaptif tetapi juga sinergis dengan kebijakan pemerintah di tingkat yang lebih tinggi. Tantangan seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, fluktuasi harga hasil pertanian dan perikanan, serta minimnya akses teknologi dan permodalan menjadi faktor eksternal yang harus dikelola secara cermat oleh perangkat daerah. Di sisi lain, potensi wilayah yang kaya sumber daya alam, serta dukungan kelembagaan dan sosial masyarakat pertanian dan perikanan, membuka peluang besar untuk menciptakan pertumbuhan sektor yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan menganalisis berbagai permasalahan yang ada, serta mencermati hasil telaah terhadap dokumen strategis seperti Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta dokumen perencanaan sektor pertanian dan ketahanan pangan Provinsi Jawa Timur, termasuk kajian RTRW dan KLHS, diperoleh gambaran umum mengenai isu-isu strategis yang menjadi perhatian utama Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP2P) Kabupaten Tuban sebagai berikut:

1. Peningkatan pendapatan petani, peternak dan nelayan/pembudidaya melalui nilai tambah sektor pertanian, peternakan dan perikanan.

Isu ini berangkat dari realitas bahwa pendapatan pelaku utama sektor pangan dan agribisnis di Kabupaten Tuban masih rendah akibat minimnya akses pasar, lemahnya posisi tawar, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan inovasi usaha. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan menjadi prioritas dengan mendorong modernisasi pertanian, pemberian fasilitasi sarana produksi, peningkatan kapasitas kelembagaan petani-nelayan, serta dukungan terhadap pengembangan usaha berbasis potensi lokal dan orientasi pasar.

2. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan buruh tani

Buruh tani merupakan kelompok rentan dalam struktur agraris daerah, dengan penghasilan rendah, akses terbatas terhadap program bantuan, dan posisi yang lemah dalam rantai nilai pertanian. Pemberdayaan buruh tani mencakup peningkatan keterampilan kerja, penyediaan akses perlindungan sosial, dan penguatan peran mereka dalam kegiatan produktif melalui skema padat karya, koperasi tani, maupun pelibatan dalam kegiatan pengolahan dan pemasaran.

3. Peningkatan Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

IKP merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan sistem ketahanan pangan daerah, yang mencakup aspek ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan. Masih adanya kerentanan pangan di wilayah tertentu serta ketergantungan pada pasokan luar daerah menjadi tantangan utama. Upaya peningkatan IKP difokuskan pada penguatan cadangan pangan daerah, pengembangan lumbung pangan masyarakat, pemanfaatan lahan pekarangan, diversifikasi pangan lokal, serta penguatan sistem distribusi dan harga pangan yang stabil.

4. Peningkatan Nilai Tambah Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Produk primer hasil pertanian, peternakan, dan perikanan di Tuban umumnya dijual dalam bentuk mentah dengan nilai ekonomi yang rendah. Oleh karena itu, peningkatan nilai tambah menjadi fokus strategis melalui pelatihan pengolahan, bantuan peralatan pascapanen, fasilitasi sertifikasi produk, dan pembukaan akses pasar yang lebih luas. Pendekatan agribisnis dan klaster ekonomi lokal menjadi bagian penting dari strategi ini.

5. Hilirisasi Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Hilirisasi merupakan proses strategis dalam meningkatkan daya saing sektor pangan dengan memperkuat keterkaitan antara produksi, pengolahan, distribusi, dan pemasaran. Kabupaten Tuban memiliki potensi besar untuk mengembangkan agroindustri skala kecil hingga menengah di sentra produksi. Hilirisasi juga mencakup penguatan kemitraan antara petani-nelayan dengan pelaku usaha, koperasi, dan BUMDesa, guna menciptakan ekosistem usaha tani dan nelayan yang berkelanjutan dan saling menguntungkan

6. Mewujudkan desa Mandiri Benih, Mandiri Pupuk, dan Mandiri Pakan Ketergantungan petani dan peternak terhadap suplai dari luar daerah untuk kebutuhan benih, pupuk, dan pakan menjadi risiko besar bagi ketahanan dan kemandirian usaha mereka. Oleh karena itu, pengembangan desa mandiri dalam tiga aspek ini menjadi isu strategis yang penting. Program ini diarahkan pada penguatan kelembagaan lokal, pengembangan unit produksi benih, pupuk organik, dan pakan ternak/budidaya ikan secara mandiri di tingkat desa, yang terintegrasikan dengan kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat

1.5 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban didasarkan pada berbagai landasan aturan dan kebijaksanaan yang mendukung antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 14

- Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2045;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029;
 29. Peraturan Bupati Tuban Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026;
 30. Peraturan Bupati Tuban Nomor 96 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 31. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah

2.1.1 Renstra Tahun 2021-2026

a. Visi dan Misi

Visi pembangunan Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 adalah : “Membangun Serta Mewujudkan Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, Berdaya Saing, dan Berbasis Lingkungan”. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal, maka ditetapkan 4 (empat) Misi untuk mewujudkan Visi Kabupaten Tuban pada Tahun 2026. Adapun Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban mengemban pada Misi kedua dan ketiga.

Misi 2 “Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sektor pertanian secara meluas (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan), pariwisata, perindustrian, perdagangan yang berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan serta menciptakan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha, membangun dan memantapkan sinergitas daya saing usaha ekonomi lokal dan pengembangan ekonomi kreatif”. Misi ke-2 ini memiliki fokus pada domain ekonomi yang berorientasi pada upaya memperkuat keunggulan sistem dan struktur perekonomian dari hulu ke hilir, dari produksi, distribusi, hingga pemasaran yang dibangun dari keunggulan berdasarkan pola dan fungsi relasi ekonomi antar ruang, antar desa, antar kawasan perdesaan, antara desa dan kota. Perekonomian daerah yang dibangun adalah ekonomi daerah yang berbasis pada nilai kemanfaatan dan semangat keterlibatan ekonomi masyarakat sebagai rakyat untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Perekonomian dikuatkan dengan memperhatikan dan mengembangkan secara optimal apa yang menjadi kekuatan dan potensi unggulan lokal Kabupaten Tuban. Untuk mewujudkan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan dibutuhkan pengembangan pemanfaatan potensi sumber daya alam yang mutlak memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pengembangan keunggulan ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi.

Pembangunan perekonomian yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat diupayakan merata sehingga kemampuan ekonomi rakyat lebih berkembang dan semakin kuat. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh daerah mencerminkan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat sehingga pemerataan hasil-hasil pembangunan juga dapat tercapai. Dengan demikian setiap program pengembangan ekonomi harus berbasis pemberdayaan masyarakat.

Misi 3 “Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan terlatih” Substansi “SDM berkualitas” mencakup aspek kecerdasan kognitif dan afektif melalui baik pendidikan akademik dan non akademik, kualitas derajat kesehatan fisik maupun psikis (mentalitas), keterampilan yang dimaknai memiliki penguasaan ketrampilan dan terlatih untuk memanfaatkan segenap potensi yang dimilikinya. Dengan berbagai modal kecakapan yang dimiliki sumber daya manusia baik sebagai individu maupun sebagai sebuah entitas kolektif tersebut, diharapkan substansi misi ke-3 (tiga) ini diarahkan pada pencapaian visi pembangunan dengan basis nilai Berbudaya, Daya Saing, dan pada gilirannya diharapkan bermuara pada nilai Kesejahteraan. Sumberdaya manusia sebagai subyek dan obyek pembangunan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan dan mewujudkan keberhasilan pembangunan. Sebagai subyek pembangunan dibutuhkan sumberdaya manusia yang berkualitas.

SDM yang berkualitas dalam hal ini dipahami sebagai SDM yang memiliki derajat pendidikan yang baik dan berprestasi, SDM yang memiliki derajat kesehatan yang baik, SDM yang memiliki ketahanan dan kemampuan konsumsi memenuhi kebutuhannya dalam arti daya beli, dan SDM yang diposisikan dalam posisi yang berkeadilan, berdaya, dan setara secara gender dan produktif untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan.

Pembangunan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan sehingga dapat membentuk sumberdaya yang berprestasi dan mampu bersaing dalam tantangan global. Pembangunan kesehatan mempunyai peranan penting dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang sehat dan produktif sebagai investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi. Pembangunan sumber daya manusia berlandaskan

budaya akan menciptakan manusia dengan pikiran, sikap, perilaku, tindakan yang memiliki nilai kesantunan, kesopanan, saling menghormati menjunjung adat istiadat, berakhlak mulia, dan bermoral.

Pembentukan watak dan penanaman budi pekerti harus mendapat prioritas pada generasi muda untuk mewujudkan karakter yang adiluhung dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama yang mengarah kepada upaya peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan modal sumber daya manusia yang berpendidikan, sehat, berprestasi berlandaskan budaya maka diharapkan tercipta sumber daya manusia yang memiliki karakter untuk berdaya saing dan membawa kemajuan dalam berkehidupan. Masyarakat yang berkarakter dan berdaya saing adalah masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan masyarakat lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

b. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam penjabaran Visi dan Misi Kabupaten Tuban tahun 2021-2026, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan mengemban 2 (dua) misi. Yaitu di misi kedua untuk urusan pertanian dan misi ketiga untuk urusan wajib pangan.

Rumusan Misi ke-2 pembangunan jangka menengah Kabupaten Tuban 2021-2026 adalah meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, peternakan dan perikanan secara luas, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, perindustrian, dan perdagangan, sebagai sinergi daya saing ekonomi yang menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan.

Misi 2 memiliki tujuan “Meningkatkan daya saing dan daya sanding (sinergi-kolaboratif) ekonomi daerah berbasis nilai tambah sektor unggulan”. Adapun tolok ukur pencapaian dari tujuan ini, salah satunya berupa indikator pertumbuhan ekonomi. Tujuan ini akan diwujudkan pencapaiannya yang salah satunya dengan sasaran meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, yang kinerja pencapaiannya akan diukur dari Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Dalam rangka mensukseskan pencapaian dari tujuan dan sasaran tersebut, maka Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan

Perikanan Kabupaten Tuban telah menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah periode 2021-2026. Adapun tujuannya adalah meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dengan indikator pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sedangkan sasaran untuk mencapai tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Meningkatnya produktifitas tanaman pangan dan produksi unggulan pertanian, dengan indikator:
 - a) produktifitas pertanian per hektar per tahun (padi);
 - b) jumlah produksi unggulan pertanian; dan
 - c) jumlah populasi ternak;
2. Meningkatnya produksi potensi unggulan perikanan, dengan indikator:
 - a) produksi total perikanan; dan
 - b) nilai tambah produk perikanan.

Untuk urusan wajib pangan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban mengemban misi ketiga yaitu “Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan terlatih”, yang pengukurannya melalui indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Misi 3 memiliki tujuan “Meningkatkan keunggulan SDM seutuhnya yang terdidik, sehat, terlatih, berdaya, dan berketahanan sosial”. Tujuan ini akan dikonstruksi pencapaiannya salah satunya melalui sasaran terjaminnya ketersediaan pangan sebagai kebutuhan dasar yang akan diukur dengan indikator indeks ketahanan pangan.

Dari sasaran tersebut, maka Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban menetapkan tujuan untuk tahun 2021-2026 yaitu terjaminnya ketersediaan pangan sebagai kebutuhan dasar, dengan indikator indeks ketahanan pangan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai yaitu meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan konsumsi pangan, dengan tolok ukur indikator pencapaian berupa Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan dan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi.

Untuk lebih jelasnya terkait dengan target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 2.1.

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan		PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	1,25	1,45	1,65	1,85	2,05
1.1		Meningkatnya produktifitas tanaman pangan dan produksi unggulan pertanian	Produktifitas pertanian per hektar per tahun (padi)	62,186	62,192	62,199	62,205	62,211
			Jumlahp Produksi unggulan pertanian	1.662.036	1.683.365	1.704.695	1.726.024	1.747.353
			Jumlah populasi ternak	17.957.336	18.316.483	18.682.813	19.056.469	19.437.599
1.2		Meningkatnya produksi potensi unggulan perikanan	Produksi total perikanan	79.181,8	82.952,36	86.722,93	90.493,49	94.264,05
			Nilai tambah produk perikanan	20.000	22.000	24.000	26.000	28.000
2	Terjaminnya ketersediaan pangan sebagai kebutuhan dasar		Indeks Ketahanan Pangan	85,5	87,3	89	90	91
2.1		Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan konsumsi pangan	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan	97,5	97,6	97,7	97,8	97,9
			Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	85,6	85,7	85,8	85,9	86

Tabel 2 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.2 Renstra Tahun 2025-2029

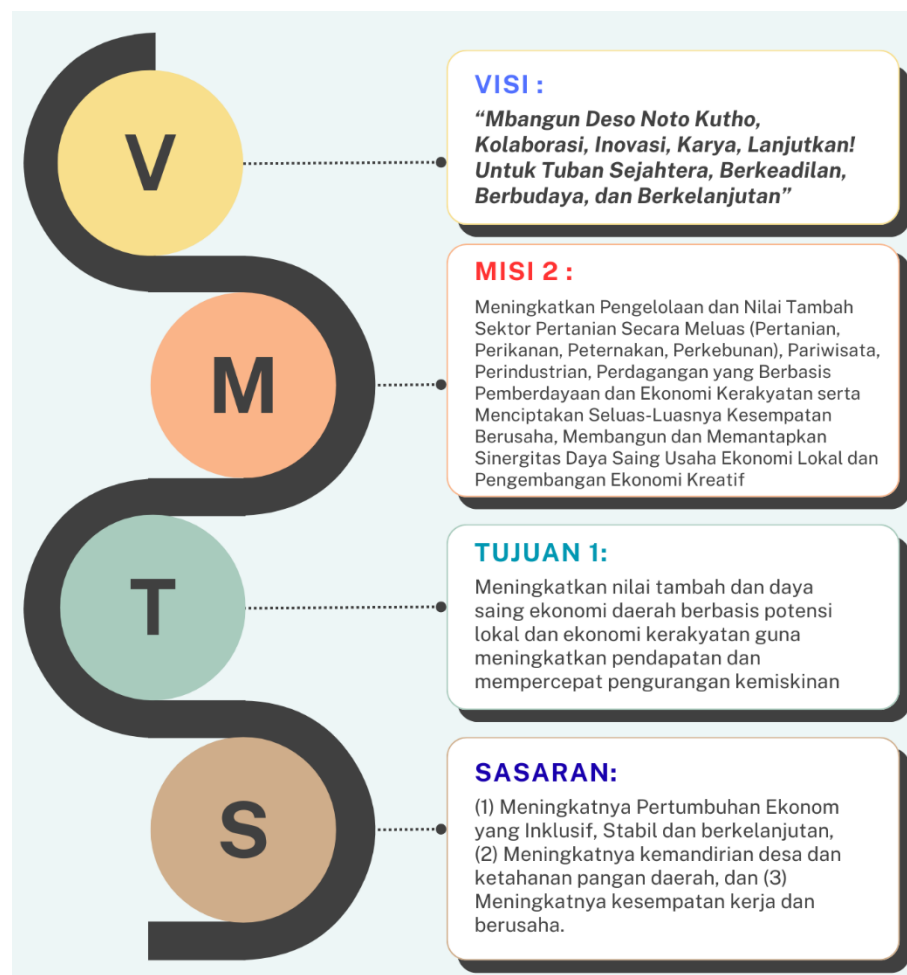
a. Visi dan Misi

Perumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP2P) diarahkan untuk mendukung Visi RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025–2029 yaitu **“Mbangun Deso Noto Kutho, Kolaborasi, Inovasi, Karya, Lanjutkan! Untuk Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, dan Berkelanjutan”**. Bentuk dukungan DKP2P tersebut selaras daerah urusan pemerintahan di bidang pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan, yang memiliki peran strategis dalam memperkuat pengelolaan dan nilai tambah sektor-sektor unggulan daerah guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan mempercepat pengurangan kemiskinan. Dengan demikian DKP2P berkontribusi dalam mendukung pencapaian Misi 2 dan Tujuan 1 RPJMD Kabupaten Tuban tahun 2025-2029.

Misi Pembangunan Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 (Misi 2): *Misi ini adalah "Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian Secara Meluas (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan), Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan yang Berbasis Pemberdayaan dan Ekonomi Kerakyatan serta Menciptakan Seluas-Luasnya Kesempatan Berusaha, Membangun dan Memantapkan Sinergitas Daya Saing Usaha Ekonomi Lokal dan Pengembangan Ekonomi Kreatif"*. Misi ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya lokal serta memperkuat daya saing sektor-sektor unggulan, dengan fokus utama pada peningkatan nilai tambah dan pemberdayaan masyarakat agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan. Keberhasilan misi ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat identitas budaya daerah, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan memastikan akses yang sama terhadap manfaat pembangunan bagi setiap warga.

Sedangkan Tujuan 1 pada Misi 2 adalah *"Meningkatkan nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal dan ekonomi kerakyatan guna meningkatkan pendapatan dan mempercepat pengurangan kemiskinan"*. Tujuan ini

menekankan bahwa pembangunan ekonomi harus memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat lokal, memperkuat daya saing daerah, dan mendorong keberlanjutan usaha berbasis sumber daya setempat, dengan tujuan besar untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mempercepat pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban. Selanjutnya DKP2P memiliki keterkaitan langsung dalam mendukung tiga sasaran yaitu; (1) Meningkatnya Pertumbuhan Ekonom yang Inklusif, Stabil dan berkelanjutan, (2) Meningkatnya kemandirian desa dan ketahanan pangan daerah, dan (3) Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha. Secara detil sebagaimana disajikan dalam gambar di bawah ini.



Gambar 2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD sebagai Acuan Penyusunan Renstra.

b. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sebagai upaya untuk mengukur pencapaian tujuan RPJMD "Meningkatkan nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal dan ekonomi kerakyatan guna meningkatkan pendapatan dan mempercepat pengurangan kemiskinan", indikator utamanya adalah PDRB Per Kapita dan Tingkat Kemiskinan.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP2P) Kabupaten Tuban adalah "Meningkatnya ketahanan pangan serta kesejahteraan petani dan nelayan". Tujuan ini selaras dengan NSPK dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Tuban, yaitu "meningkatnya kemandirian desa dan ketahanan pangan daerah". Dengan fokus pada penguatan sistem pangan lokal, pemberdayaan petani dan nelayan, serta peningkatan nilai tambah sektor pertanian dan perikanan, DKP2P diharapkan mampu menciptakan ketahanan pangan yang tangguh, berdaulat, serta mendukung pembangunan desa yang mandiri dan produktif.

Indikator tujuan Renstra DKP2P Kabupaten Tuban tahun 2025-2029 dirumuskan melalui tiga ukuran utama, yaitu:

1. Indeks Ketahanan Pangan;
2. Nilai Tukar Petani; serta
3. Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Indeks Ketahanan Pangan mencerminkan kondisi ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan secara berkelanjutan di daerah. Nilai Tukar Petani menunjukkan tingkat kesejahteraan petani melalui perbandingan antara harga yang diterima dan dikeluarkan petani. Sementara itu, Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menjadi gambaran kontribusi sektor tersebut terhadap peningkatan perekonomian daerah. Peningkatan pada ketiga indikator tersebut menegaskan bahwa strategi dan program yang dilaksanakan oleh dinas tidak hanya memperkuat sistem ketahanan pangan, tetapi juga mendorong kemandirian desa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, selaras dengan NSPK Sasaran RPJMD Kabupaten Tuban.

Dengan demikian, pencapaian Indeks Ketahanan Pangan, Nilai Tukar Petani, serta Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan berbagai program strategis yang dijalankan. Seluruh program tersebut dirancang untuk secara langsung meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan keamanan pada sektor pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Peningkatan pada sektor-sektor ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, membuka peluang kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mempercepat pengurangan kemiskinan. Pada akhirnya, arah kebijakan ini sejalan dengan visi “*Mbangun Deso Noto Kutho, Kolaborasi, Inovasi, Karya, Lanjutkan! Untuk Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, dan Berkelanjutan*”.

Sasaran merupakan penjabaran lebih operasional dari tujuan perangkat daerah yang mencerminkan hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah, baik dari sisi kualitas layanan publik maupun dampaknya terhadap masyarakat. Dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP2P) Kabupaten Tuban Tahun 2025–2029, penetapan sasaran disusun untuk memastikan konsistensi antara tujuan daerah dengan arah kebijakan sektoral, serta sebagai dasar dalam penyusunan program dan kegiatan yang terukur. Sasaran-sasaran ini juga dilengkapi dengan indikator kinerja utama yang akan digunakan untuk mengukur capaian kinerja DKP2P secara periodik selama lima tahun pelaksanaan. Terdapat dua sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP2P) Kabupaten Tuban tahun 2025-2029 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran 1: Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pertanian dan Perikanan serta Kemandirian Pangan

Sasaran ini mendukung langsung Misi 2 Kabupaten Tuban, yaitu meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sektor pertanian secara meluas, serta mendukung Tujuan 1, yaitu meningkatkan nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal dan ekonomi kerakyatan guna meningkatkan pendapatan dan mempercepat pengurangan

kemiskinan. DKP2P berperan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku utama sektor pertanian dan perikanan melalui program yang mendukung produksi, akses pasar, dan perlindungan harga.

Sasaran ini dirumuskan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan, dengan menitikberatkan pada peningkatan daya beli dan ketahanan pangan individu. Hal ini penting untuk mewujudkan kemandirian pangan yang inklusif dan berkelanjutan. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah:

- 1) Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU) (%)
- 2) Nilai Tambah Produk Perikanan (Rupiah)
- 3) Nilai Tambah Produk Unggulan Pertanian-Padi (Rupiah)
- 4) Nilai Tambah Produk Unggulan Peternakan-Sapi (Rupiah)

Sasaran Renstra DKP2P Kabupaten Tuban diarahkan pada “Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pertanian dan Perikanan serta Kemandirian Pangan” dengan indikator capaian yang mencerminkan keberhasilan pembangunan sektor tersebut. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU) digunakan untuk mengukur tingkat ketercukupan konsumsi pangan masyarakat, sehingga dapat menjadi gambaran kualitas ketahanan pangan daerah. Nilai Tambah Produk Perikanan mencerminkan peningkatan daya saing dan kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan daerah, sementara Nilai Tambah Produk Unggulan Pertanian, khususnya padi, menunjukkan efektivitas pengelolaan komoditas utama dalam mendukung ketahanan pangan. Selain itu, Nilai Tambah Produk Unggulan Peternakan, seperti sapi, menggambarkan peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha peternakan yang berkontribusi pada kesejahteraan petani. Keempat indikator ini secara sinergis menjadi tolok ukur untuk menilai tercapainya peningkatan nilai tambah dan kemandirian pangan di Kabupaten Tuban.

Dengan berfokus pada keempat indikator tersebut, arah pembangunan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan di Kabupaten Tuban diharapkan mampu menghasilkan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya

peningkatan nilai tambah tidak hanya memperkuat ketahanan pangan daerah, tetapi juga mendorong tumbuhnya ekonomi lokal yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Hal ini sekaligus menegaskan peran strategis DKP2P dalam mendukung terwujudnya kemandirian pangan serta kontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tuban.

2. Sasaran 2: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perangkat Daerah

Sasaran ini turut mendukung keberhasilan tata kelola pemerintahan yang responsif dan akuntabel, sesuai prinsip *good governance*. Sasaran ini tidak hanya mencerminkan kualitas pelayanan teknis, tetapi juga persepsi dan kepuasan masyarakat terhadap layanan DKP2P. Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik DKP2P, khususnya dalam penyediaan sarana, informasi, dan pendampingan program kepada masyarakat di sektor pangan, pertanian, dan perikanan. Sasaran kedua difokuskan pada peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh DKP2P Kabupaten Tuban. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah *Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah*.

Berikut ini disajikan tabel capaian dan target indikator sasaran Renstra DKP2P Kabupaten Tuban Tahun 2025–2029. Tabel ini memuat indikator kinerja utama dari dua sasaran strategis yang telah ditetapkan, yaitu peningkatan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan dalam mewujudkan kemandirian pangan serta peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan perangkat daerah. Data dalam tabel mencakup realisasi capaian tahun 2022 hingga 2024 serta target yang direncanakan untuk lima tahun ke depan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan evaluasi kinerja secara berkala.

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
1	Meningkatnya ketahanan pangan serta kesejahteraan petani dan nelayan		Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	85,85	86,41	86,97	87,53	88,09	88,65	89,21
			Nilai Tukar Petani	Indeks	114,88	116,48	118,08	119,68	121,28	122,88	124,48
			Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	2,18	2,19	2,2	2,21	2,22	2,23	2,24
		Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian dan perikanan serta kemandirian pangan	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU)	%	7,89	6,99	6,71	6,43	6,15	5,87	5,59
			Nilai Tambah Produk Perikanan (Rupiah)	Rupiah	24.050	26.000	28.000	30.000	32.000	34.000	36.000

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
			Nilai Tambah Produk Unggulan Pertanian-Padi (Rupiah)	Rupiah	Belum Rilis	7.000	7.350	7.750	8.150	8.600	9.000
			Nilai Tambah Produk Unggulan Pternakan-Sapi (Rupiah)	Rupiah	Belum Rilis	36.750	38.550	40.500	42.550	44.650	46.900
		Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	87,03	87,73	88,43	89,13	89,83	90,53	91,23

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban 2025-2029

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

2.2.1 PK Tahun 2025 (Perencanaan Awal/Lama)

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban mengampu 3 (tiga) jenis urusan, yaitu Urusan pemerintahan bidang Pangan, Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan serta Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja utama beserta target kinerja pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No.	Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (satuan)	Formulasi Penghitungan	Target Tahun 2025
1	Meningkatnya produktifitas tanaman pangan dan produksi unggulan pertanian	Produktifitas pertanian per hektar per tahun (padi) (ku/ha)	jumlah produksi padi dibagi luas panen padi	62,205
		Jumlah produksi unggulan pertanian (ton)	Jumlah produksi total dari padi, jagung, kacang tanah, tebu, tembakau, kelapa, cabe rawit, cabe besar, bawang merah, belimbing, jeruk, jambu biji	1.726.024
		Jumlah populasi ternak (ekor)	Jumlah ternak (Ternak besar, ternak kecil, unggas, aneka ternak) pada tahun berjalan	19.056.469
2	Meningkatnya produksi potensi unggulan perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (ton)	Jumlah produksi perikanan budidaya + perikanan tangkap	90.493,49
		Nilai tambah produk perikanan (Rp/Kg)	$VA = ((P-TC)+IC)/P$, VA = Nilai Tambah, P = Harga Jual, TC = Biaya produksi total, IC = Biaya tidak langsung	26.000
3	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan konsumsi pangan	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan (poin)	Jumlah total skor PPH ketersediaan kelompok pangan	97,8
		Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi (poin)	Jumlah total skor PPH konsumsi kelompok pangan	94,9

Tabel 2.3 Target Kinerja Tahun 2025

Dari indikator kinerja utama yang telah ditentukan sebagaimana pada tabel sebelumnya, didukung dengan 14 Program dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 70.397.118.645,00. Sumber anggaran tersebut terdiri dari APBD Kabupaten Tuban, Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK-NF) serta DBHCHT. Adapun alokasi anggaran per program tersaji pada tabel berikut ini.

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	5.290.500.000	APBD/DAK NF
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	130.000.000	APBD
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	120.000.000	APBD
4	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.316.849.300	APBD
5	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	541.514.250	APBD
6	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	25.000.000	APBD
7	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	430.000.000	APBD
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	42.257.724.995	APBD
9	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	5.225.800.000	APBD/DBHCHT
10	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	10.950.630.100	APBD/DBHCHT
11	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2.802.100.000	APBD/DAK NF
12	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	270.000.000	APBD
13	Program Perizinan Usaha Tani	37.000.000	APBD
14	Program Penyuluhan Pertanian	3.413.779.500	APBD/DAK NF
	Total	70.397.118.645	

Tabel 2.4 Pagu Anggaran tahun 2025

2.2.2 Review/Perubahan PK Tahun 2025

No.	Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (satuan)	Formulasi Penghitungan	Target Tahun 2025
1	Meningkatnya produktifitas tanaman pangan dan produksi unggulan pertanian	Produktifitas pertanian per hektar per tahun (padi) (ku/ha)	jumlah produksi padi dibagi luas panen padi	62,205
		Jumlah produksi unggulan pertanian (ton)	Jumlah produksi total dari padi, jagung, kacang tanah, tebu, tembakau, kelapa, cabe rawit, cabe besar, bawang merah, belimbing, jeruk, jambu biji	1.726.024
		Jumlah populasi ternak (ekor)	Jumlah ternak (Ternak besar, ternak kecil, unggas, aneka ternak) pada tahun berjalan	19.056.469
2	Meningkatnya produksi potensi unggulan perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (ton)	Jumlah produksi perikanan budidaya + perikanan tangkap	90.493,49
		Nilai tambah produk perikanan (Rp/Kg)	$VA = ((P-TC)+IC)/P$, VA = Nilai Tambah, P = Harga Jual, TC = Biaya produksi total, IC = Biaya tidak langsung	26.000
3	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan konsumsi pangan	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan (poin)	Jumlah total skor PPH ketersediaan kelompok pangan	97,8
		Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi (poin)	Jumlah total skor PPH konsumsi kelompok pangan	94,9

Tabel 2 5 Review/Perubahan PK Tahun 2025

Dari indikator kinerja utama yang telah ditentukan sebagaimana pada tabel sebelumnya, didukung dengan 14 Program dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 64.565.801.961,00. Sumber anggaran tersebut terdiri dari APBD Kabupaten Tuban, Dana Alokasi Khusus (DAK) pertanian serta DBHCHT. Adapun alokasi anggaran per program tersaji pada tabel berikut ini.

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	4.720.913.406	P-APBD/DAK NF
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	105.986.242	P-APBD

No.	Program	Anggaran	Keterangan
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	85.587.857	P-APBD
4	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.315.818.989	P-APBD
5	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.179.779.175	P-APBD
6	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	11.586.975	P-APBD
7	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	203.334.076	P-APBD
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	34.431.239.490	P-APBD
9	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	5.353.614.911	P-APBD/DBHCHT
10	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	7.998.476.583	P-APBD/DAK NF /DBHCHT
11	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2.641.421.931	P-APBD/DAK NF
12	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	204.231.314	P-APBD
13	Program Perizinan Usaha Tani	7.937.500	P-APBD
14	Program Penyuluhan Pertanian	5.305.873.512	P-APBD/DAK NF
	Total	64.565.801.961	

Tabel 2.6 Alokasi Pagu Anggaran P-APBD 2025

2.2.3 Ringkasan Perubahan PK Tahun 2025

PK AWAL PERENCANAAN (Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026)			REVIEW/PERUBAHAN PK (Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029)			KETERANGAN (Diisi indikator tetap, berubah, dihapus, atau ditambahkan)
No	Sasaran	Indikator	No	Sasaran	Indikator	
1	Meningkatnya produktivitas tanaman pangan dan produksi unggulan pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (padi)	1	Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian dan perikanan serta kemandirian pangan	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU)	Indikator berubah
		Jumlah produksi unggulan pertanian			Nilai tambah produk pertanian (padi)	Indikator berubah
		Jumlah populasi ternak			Nilai tambah produk peternakan (Sapi)	Indikator berubah
2	Meningkatnya produksi potensi unggulan perikanan	Jumlah total produksi perikanan			Nilai tambah Produk perikanan	Indikator tetap
		Nilai tambah produk perikanan	2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) perangkat daerah	Indikator berubah

PK AWAL PERENCANAAN (Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026)			REVIEW/PERUBAHAN PK (Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029)			KETERANGAN (Diisi indikator tetap, berubah, dihapus, atau ditambahkan)
No	Sasaran	Indikator	No	Sasaran	Indikator	
	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan konsumsi pangan	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan				Indikator dihapus
		Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi				Indikator dihapus

Tabel 2.7 Ringkasan Perubahan PK Tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

A. Capaian Kinerja Tahun 2025 (berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 perencanaan awal/sebelum perubahan)

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (sampai dengan TW-3)	Realisasi Kinerja (sampai dengan TW-3)	Program/Kegiatan	Bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan
Meningkatnya produktivitas tanaman pangan dan produksi unggulan pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (padi)	62,205 kuintal/hektar	7.536.850.600	62,205	4.082.640.787		
	Jumlah produksi unggulan pertanian	1.726.024 ton					
	Jumlah populasi ternak	19.056.469 ekor					
	Persentase prasarana pertanian yang digunakan	79,74%	5.353.614.911	-	547.798.360	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
	Persentase peningkatan pendapatan retribusi pemeriksaan hewan sebelum dipotong	10%		-			
	Luas lahan pengembangan tanaman pangan, perkebunan	169 hektar	2.464.823.600	-	274.836.390	Kegiatan Pengembangan	Penyusunan SP Lahan

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (sampai dengan TW-3)	Realisasi Kinerja (sampai dengan TW-3)	Program/Kegiatan	Bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan
	dan hortikultura					Prasarana Pertanian	
	Jumlah prasarana pertanian dalam kondisi baik	152606 meter	5.072.027.000	-	272.961.970	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Pemeliharaan RPH
	Persentase penggunaan sarana pertanian yang sesuai standar	92,3%	5.532.800.000	-	437.791.866	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
	Jumlah sarana pertanian yang digunakan	351 unit	4.205.800.000	-	69.635.136	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi
	Jumlah jenis sumber daya genetik hewan yang dikelola	3 jenis	450.000.000	2 jenis	33.957.446	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Penerbitan SKLB
	Jumlah kelahiran ternak hasil IB	100.000 ekor	500.000.000	49245 ekor	312.607.290	Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih /Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Bimtek petugas IB

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (sampai dengan TW-3)	Realisasi Kinerja (sampai dengan TW-3)	Program/Kegiatan	Bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan
	Persentase Petshop Yang Memenuhi Standar Mutu Khasiat dan Keamanan Obat Hewan Yang Beredar	20%	20.000.000	10%	9.300.000	Kegiatan Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Monev ke toko obat hewan
	Jumlah pengendalian dan pengawasan peredaran bibit/benih ternak dan Hijauan Makanan Ternak (HMT)	100%	50.000.000	75%	12.291.994	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengambilan sampel pakan ternak
	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	100%	270.000.000	-	70.240.000	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pelaksanaan Gerdal Tikus
	Luas area pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	600 hektar	270.000.000	-	70.240.000	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Gerdal Tikus
	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota	100%	37.000.000	-	6.342.500	Program Perizinan Usaha Pertanian	Monev RMU
	Jumlah rekomendasi izin usaha pertanian yang dikeluarkan	2 rekomendasi	37.000.000	1 rekomendasi	6.342.500	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian	Monev RMU

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (sampai dengan TW-3)	Realisasi Kinerja (sampai dengan TW-3)	Program/Kegiatan	Bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan
						yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	Persentase kelompok tani kelas utama	9,3%	3.413.779.500	-	1.043.192.037	Program Penyuluhan Pertanian	
	Jumlah petani yang menerapkan teknologi berdasarkan rekomendasi	181572 orang	3.413.779.500	1500 orang	1.043.192.037	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Penyusunan program penyuluhan, pelaksanaan Sekolah Lapang
	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular menular	19,85%	2.802.100.000	-	1.977.276.024	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
	Persentase cakupan pelayanan hewan terpadu	1,49%	442.500.000	-	385.611.023	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan obat hewan
	Persentase cakupan pengawasan peredaran hewan	70%	25.000.000	-	20.400.000	Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan	Monev di pasar hewan (KIE)

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (sampai dengan TW-3)	Realisasi Kinerja (sampai dengan TW-3)	Program/Kegiatan	Bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan
						Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	
	Jumlah pelayanan jasa laboratorium dan medik veteriner	30 laporan	1.824.600.000	10 laporan	1.182.768.067	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penanganan PMK
	Jumlah produk yang memenuhi standar persyaratan teknis kesmavet	75 produk	335.000.000	10 produk	301.981.334	Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pelatihan Juleha Unggas
	Jumlah Pelaku Usaha/peternak yang menerapkan persyaratan teknis kesejahteraan hewan	30 orang	175.000.000	30 orang	86.515.600	Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Pelatihan Juleha hewan kurban
Meningkatnya produksi potensi unggulan perikanan	Jumlah total produksi perikanan	90493,49Ton	2.316.849.300	77341,7 ton	311.776.968		

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (sampai dengan TW-3)	Realisasi Kinerja (sampai dengan TW-3)	Program/Kegiatan	Bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan
	Nilai tambah produk perikanan	26000 Rp/thn		15000 Rp/thn			
	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap kabupaten/kota	37493.33 ton		27432,9 ton	101.751.000	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	
	Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	10%		-			
	Jumlah sarana prasarana usaha perikanan tangkap	16 paket	1.115.284.500	-	57.713.500	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Update data nelayan
	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha	50 RTP	946.564.800	40 RTP	33.913.500	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi SeHAT
	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang beroperasi	100%	230.000.000	100%	0	Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (sampai dengan TW-3)	Realisasi Kinerja (sampai dengan TW-3)	Program/Kegiatan	Bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan
	Jumlah tanda daftar kapal perikanan yang di fasilitasi pengajuannya	300 dokumen	25.000.000	220 dokumen	10.124.000	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi dokumen kapal
	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya kabupaten/kota	53000,16 Ton	541.514.250	36526,31 ton	90.747.075	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
	Jumlah pembudidaya yang difasilitasi penerbitan izin usahanya	10 IUP	30.000.000	-	0	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	Jumlah pembudidaya ikan yang mendapatkan pendampingan/pelatihan	400 orang	120.000.000	200 orang	27.707.775	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Fasilitasi SeHAT pembudidaya

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (sampai dengan TW-3)	Realisasi Kinerja (sampai dengan TW-3)	Program/Kegiatan	Bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan
	Jumlah Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) yang diterbitkan	100 dokumen	25.000.000	50 dokumen	9.685.750	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi TDPIK
	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi	3921170000 ekor	366.514.250	3147136000 ekor	53.353.550	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Optimalisasi BBI
	Jumlah Kawasan yang Dipantau	14 Kali	25.000.000	10 kali	0	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
	Jumlah RTP yang dipantau	50 RTP	25.000.000	35 RTP	0	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	
	Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan	42973 Ton	430.000.000	31075	119.278.893	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (sampai dengan TW-3)	Realisasi Kinerja (sampai dengan TW-3)	Program/Kegiatan	Bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan
	Jumlah UMK (skala mikro kecil) yang difasilitasi	30 UMK	50.000.000	1 UMK	8.980.513	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Updating data poklhasar
	Jumlah unit usaha pengolah yang dibina	20 unit	30.000.000	1 unit	12.040.000	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Bimtek olahan ikan
	Tingkat ketersediaan bahan baku ikan olahan	56,07 Kg/kap/Thn	350.000.000	-	98.258.380	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Bimtek pengolahan ikan untuk koki ponpes
Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan konsumsi pangan	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan	92.8 poin		-	669.018.250		
	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	95.2 poin		-			
	Persentase ketersediaan pangan masyarakat	0,09%	5.290.500.000	-	609.430.750	Program Peningkatan	

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (sampai dengan TW-3)	Realisasi Kinerja (sampai dengan TW-3)	Program/Kegiatan	Bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan
						Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
	ketersediaan energi per kapita	3583 kkal/kap/hari	464.500.000	-	51.834.500	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pelaksanaan GPM
	Jumlah cadangan pangan daerah	5000 kg	375.000.000	-	3.040.000	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Monev lumbung
	konsumsi energi per kapita	2100 kkal/kap/hari	4.451.000.000	-	554.556.250	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Penyusunan analisis konsumsi pangan
	Persentase desa tahan pangan	100%	130.000.000	-	4.760.000	Program Penanganan	

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (sampai dengan TW-3)	Realisasi Kinerja (sampai dengan TW-3)	Program/Kegiatan	Bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan
						Kerawanan Pangan	
	Jumlah peta kerentanan pangan yang tersedia	1 dokumen	100.000.000	-	0	Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	
	jumlah desa rentan pangan	30 desa	30.000.000	-	4.760.000	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Monev
	Persentase keamanan pangan	100%	120.000.000	100%	54.827.500	Program Pengawasan Keamanan Pangan	
	Jumlah sampel bahan makanan yang diuji	50 item	120.000.000	40 item	54.827.500	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Pengujian PSAT
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	84,35 poin	42.257.724.995	-	19.363.186.222	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (sampai dengan TW-3)	Realisasi Kinerja (sampai dengan TW-3)	Program/Kegiatan	Bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60 dokumen	277.619.764	56 dokumen	73.113.500	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan
	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	13 laporan	33.928.869.895	11 laporan	16.113.879.505	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji dan tunjangan
	Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai	335 orang	177.215.000	-	0	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum	6 layanan	767.947.888	6 layanan	347.695.651	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan ATK, mamin rapat, perjalanan dinas luar daerah
	Jumlah Pengadaan BMD	1 unit	7.502.880	1 unit	7.500.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan smart TV
	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang	5 jasa	3.498.481.580	5 jasa	2.166.610.585	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Pembayaran air, listrik, internet dan honor Non PNS

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (sampai dengan TW-3)	Realisasi Kinerja (sampai dengan TW-3)	Program/Kegiatan	Bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan
						Pemerintahan Daerah	
	Jumlah Pemeliharaan BMD	2609 unit	3.600.087.988	1814 unit	654.386.981	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan kendaraan dinas, gedung kantor

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025 (berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 perencanaan awal/sebelum perubahan)

B. Capaian atas Review/Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Tujuan : Meningkatnya ketahanan pangan serta kesejahteraan petani dan nelayan	Indeks Ketahanan Pangan	86,41	73,23	84,75
		Nilai Tukar Petani	116,48	119,01	102,17
		Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,19	2,18 *)	
	Sasaran : Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian dan perikanan serta kemandirian pangan	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU)	6,99	7,02	99,57
		Nilai Tambah Produk Perikanan (Rupiah)	26.000	26.550	102,12
		Nilai Tambah Produk Unggulan Pertanian-Padi (Rupiah)	7.000	7.000	100
		Nilai Tambah Produk Unggulan Peternakan-Sapi (Rupiah)	36.750	37.516	102,08
	Sasaran: Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,73	87,07	99,25

Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Keterangan: *) realisasi tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa beberapa indikator kinerja dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban pada tahun 2025 masih belum dapat mencapai target, yaitu Indeks Ketahanan Pangan. Ketidak tercapaian ini dikarenakan adanya perbedaan formulasi dengan tahun-tahun

sebelumnya yang semula terdiri dari 9 variabel menjadi 12 variabel, sehingga berpengaruh pada indeks kompositnya. Selanjutnya indikator PoU dibandingkan dengan tahun sebelumnya pencapaian tahun 2025 mengalami penurunan (lebih baik), namun masih belum mencapai target karena di wilayah tertentu terutama di wilayah perikanan mengalami penurunan kuantitas konsumsi. Indikator IKM juga masih belum mencapai target karena dari 9 unsur penilaian masih terdapat satu unsur yang masuk dalam prioritas utama perbaikan yaitu unsur produk spesifikasi jenis layanan.

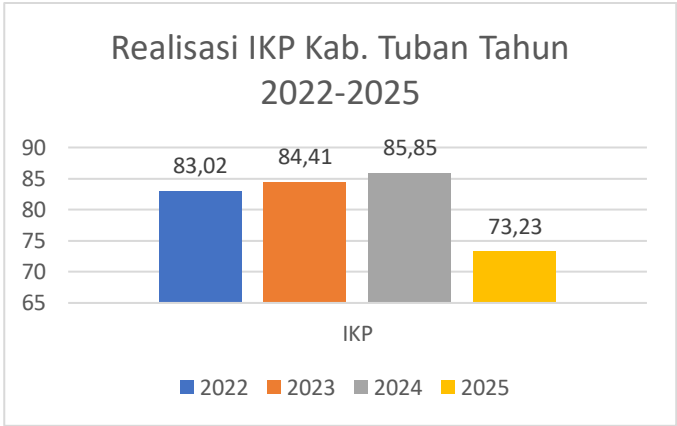
Sementara itu, terdapat satu indikator yaitu Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menunggu rilis dari BPS Kab. Tuban. Sedangkan indikator Nilai Tambah Produk Unggulan Pertanian-Padi tercapai sesuai target di angka 7.000 rupiah. Dan 3 indikator lainnya dapat melampaui target yaitu Nilai Tukar Petani dengan capaian 102,17% yang dipengaruhi oleh adanya peningkatan NTP per sub sektor. Indikator Nilai Tambah Produk Perikanan mencapai 102,12% dikarenakan adanya peningkatan hasil produksi perikanan. Indikator Nilai Tambah Produk Unggulan Peternakan-Sapi juga mencapai 102,08%, adanya pelatihan Juleha (Juru SEmbelih Halal) yang diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban dapat meningkatkan animo masyarakat untuk membeli daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi			2025		Capaian terhadap tahun			
			2022	2023	2024	target	realisasi	2022	2023	2024	2025
Tujuan: Meningkatnya ketahanan pangan serta kesejahteraan petani dan nelayan	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	83,02	84,41	85,85	86,41	73,23	88,21	86,76	85,30	84,75
	Nilai Tukar Petani	Indeks	106,80	113,13	114,88	116,48	119,01	111,43	105,20	103,60	102,17
	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	1,89	0,74	2,18	2,19	2,18 *)	115,34	294,59	100	100
Sasaran: Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian dan perikanan serta kemandirian pangan	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU)	%	7,59	6,83	7,89	6,99	7,02	108,12	97,29	112,39	99,57
	Nilai Tambah Produk Perikanan (Rupiah)	Rupiah	20.000	22.150	24.050	26.000	26.550	132,75	119,86	110,40	102,12
	Nilai Tambah Produk Unggulan Pertanian-Padi (Rupiah)	Rupiah	n/a	n/a	n/a	7.000	7.000	n/a	n/a	n/a	100
	Nilai Tambah Produk	Rupiah	n/a	n/a	n/a	36.750	37.516	n/a	n/a	n/a	102,08

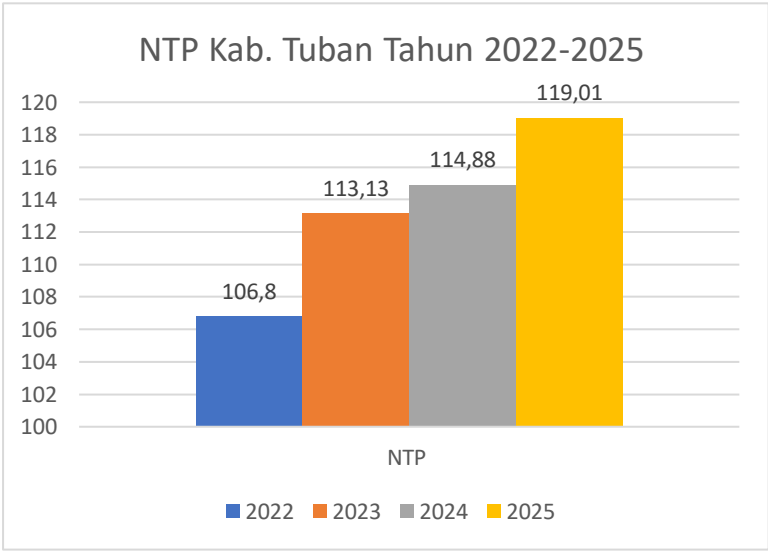
Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi			2025		Capaian terhadap tahun			
			2022	2023	2024	target	realisasi	2022	2023	2024	2025
	Unggulan Pernakan- Sapi (Rupiah)										
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	n/a	83,19	87,03	87,73	87,07	n/a	104,66	100,04	99,25

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir



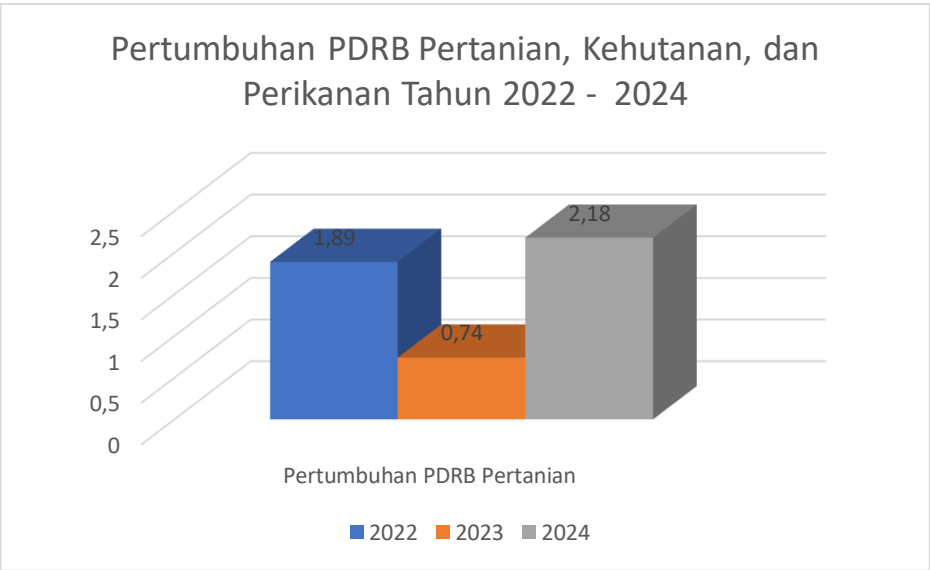
Gambar 3.1 Realisasi IKP tahun 2022-2025

Pada tahun 2022 sampai 2024 angka Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Tuban selalu mengalami peningkatan, namun tahun 2025 terjadi penurunan yang sangat signifikan. Berdasarkan data dari Badan Ketahanan Pangan Nasional bahwa nilai komposit IKP (data backcasting) Kabupaten Tuban pada tahun 2024 mencapai 73,66. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 0,58%.



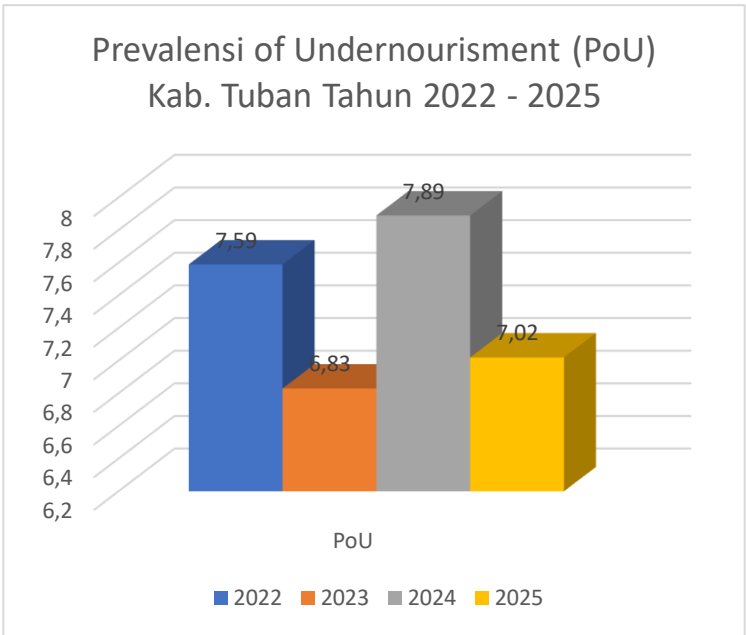
Gambar 3.2 Realisasi NTP Tahun 2022-2025

Tren Nilai Tukar Petani di Kabupaten Tuban selalu meningkat tiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat mulai tahun 2022 capaian sebesar 106,80 selanjutnya tahun 2023 naik menjadi 113,13. Tahun 2024 terus naik di angka 114,88 dan tahun 2025 meningkat di angka 119,01. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan petani di Kabupaten Tuban terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.



Gambar 3.3 Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2022-2024

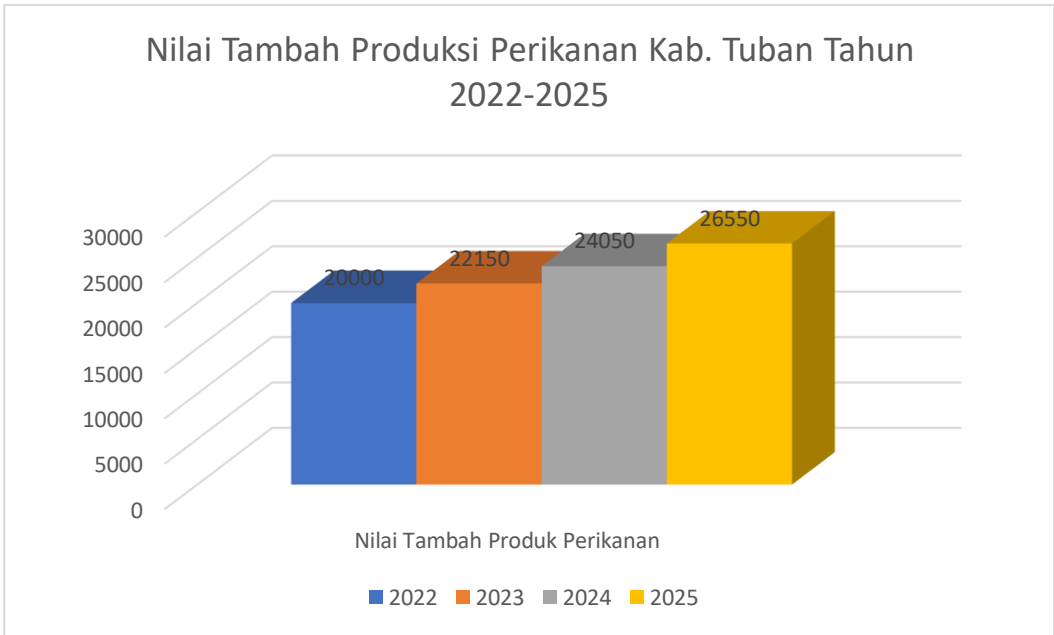
Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Tuban mengalami fluktuatif tiap tahunnya. Pada tahun 2023 capaian mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022, sedangkan pada tahun 2024 kembali meningkat lagi, bahkan lebih baik dari tahun 2022. Capaian tahun 2025 masih belum diketahui angkanya, menunggu rilis dari BPS yang biasanya di bulan Maret.



Gambar 3.4 Realisasi PoU Kab. Tuban Tahun 2022-2025

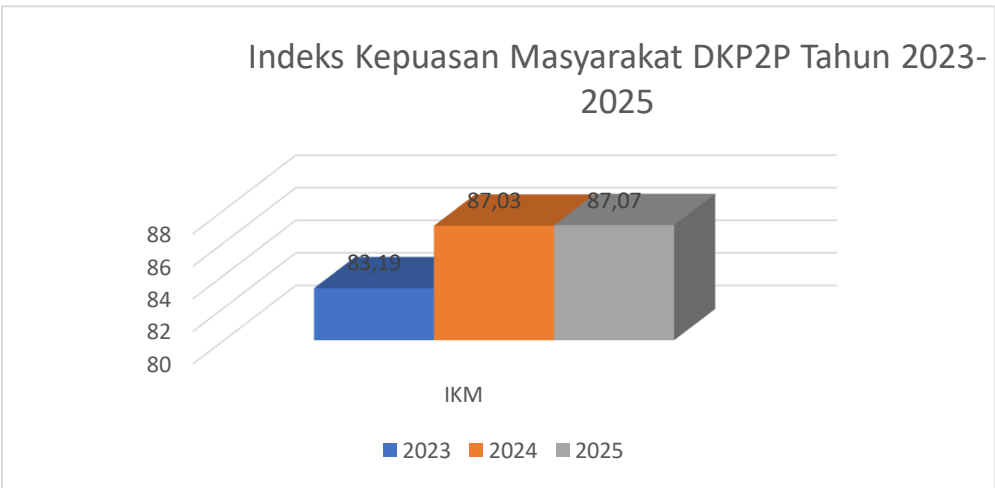
Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa tren nilai PoU di Kabupaten Tuban juga fluktuatif. PoU memiliki sifat tren negatif, yang artinya semakin kecil nilainya, maka semakin bagus capaiannya. Berdasarkan data capaian dari tahun 2022-2025, capaian terbaik ada di tahun 2023

dimana angka PoU mencapai 6,83. Angka ini lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2022 yang berada di angka 7,59. Tahun 2024 capaian kembali naik di angka 7,89. Angka ini tidak lebih rendah daripada tahun 2022. Dan tahun 2025 mengalami penurunan kembali (lebih baik) di angka 7,02. Namun demikian masih belum dapat mencapai target yang telah ditentukan, yaitu di angka 6,99.



Gambar 3.5 Nilai Tambah Produk Perikanan tahun 2022-2025

Nilai tambah Produk Perikanan di Kabupaten Tuban selalu meningkat di setiap tahunnya. Mulai dari Rp. 20.000,00 di tahun 2022 dan terus meningkat hingga menjadi Rp. 26.550,00 di tahun 2025. Tahun 2025 ini pun juga dapat melampaui target yang ditetapkan yaitu Rp. 26.000,00. Sedangkan untuk nilai tambah produk unggulan pertanian (padi) dan produk peternakan (sapi) masih belum bisa dibandingkan dengan capaian di tahun-tahun sebelumnya, karena 2 indikator ini merupakan indikator baru yang belum pernah dihitung di tahun-tahun sebelumnya.



Gambar 3.6 IKM DKP2P Tahun 2023-2025

Untuk indeks kepuasan masyarakat mengalami tren peningkatan setiap tahunnya. Dari data yang ada didapatkan mulai tahun 2023 selalu meningkat hingga tahun 2025. Meskipun begitu untuk tahun 2025 capaian IKM masih belum mampu mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 87,73.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah (Target Akhir Renstra)

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi sampai dengan Tahun 2025	Target Akhir Renstra	Tingkat Kemajuan (%)
Tujuan: Meningkatnya ketahanan pangan serta kesejahteraan petani dan nelayan	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	73,23	89,21	82,09
	Nilai Tukar Petani	Indeks	119,01	124,48	95,61
	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	2,18 *)	2,24	97,32 *)
Sasaran: Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian dan perikanan serta kemandirian pangan	Prevalensi Ketidacukup an Konsumsi Pangan (PoU)	%	7,02	5,59	79,63
	Nilai Tambah Produk Perikanan (Rupiah)	Rupiah	26.550	36.000	73,75
	Nilai Tambah Produk Unggulan Pertanian-Padi (Rupiah)	Rupiah	7.000	9.000	77,78
	Nilai Tambah Produk Unggulan Peternakan-Sapi (Rupiah)	Rupiah	37.516	46.900	79,99
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	87,07	91,23	95,44

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah (Target Akhir Renstra)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk Indeks Ketahanan Pangan, capaian di awal periode Renstra mencapai 82,09%. Jika Berdasarkan pada target nilai yang telah ditetapkan pada periode akhir Renstra, terdapat selisih yang sangat banyak sehingga membutuhkan strategi dan kebijakan agar nantinya target tersebut dapat tercapai. Untuk Nilai Tukar

Petani telah mencapai 95,61% dari target akhir Renstra. Diharapkan tiap tahun selalu terdapat kenaikan sehingga nantinya target akhir Renstra dapat terlampaui. Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan untuk tahun 2025 masih belum dapat dihitung tingkat capaiannya terhadap target akhir renstra dikarenakan masih menunggu rilis data dari BPS. Data yang ada sementara adalah capaian di tahun 2024 sebesar 2,18% sehingga capaian terhadap target akhir renstra didapatkan sebesar 97,32%. PoU di awal renstra ini mencapai 79,63% terhadap target di akhir Renstra. Diharapkan nilai PoU setiap tahun akan semakin kecil angkanya. Capaian nilai tambah produksi pertanian, peternakan dan perikanan terhadap target akhir Renstra masing-masing masih di bawah 80%. Sedangkan untuk nilai IKM mencapai 95,44% di awal tahun Renstra.

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Organisasi Lain yang Setipe/Provinsi/Nasional (Benchmark Kinerja)

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja		
			OPD	Organisasi lain yang setipe/Provinsi/Nasional (Benchmark Kinerja)	
				Provinsi	Nasional
Tujuan: Meningkatnya ketahanan pangan serta kesejahteraan petani dan nelayan	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	73,23	72,67	73
	Nilai Tukar Petani	Indeks	119,01	112,24	122,97
	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	2,18 *)	0,01*)	3,18 *)
Sasaran: Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian dan perikanan serta kemandirian pangan	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU)	%	7,02	8,05	7,89
	Nilai Tambah Produk Perikanan (Rupiah)	Rupiah	26.550	n/a	n/a
	Nilai Tambah Produk Unggulan Pertanian-Padi (Rupiah)	Rupiah	7.000	n/a	n/a
	Nilai Tambah Produk Unggulan Peternakan-Sapi (Rupiah)	Rupiah	37.516	n/a	n/a

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja		
			OPD	Organisasi lain yang setipe/Provinsi/Nasional (Benchmark Kinerja)	
				Provinsi	Nasional
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	87,07	n/a	n/a

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Organisasi Lain yang Setipe/Provinsi/Nasional (Benchmark Kinerja)

Tabel di atas merupakan perbandingan dari realisasi indikator yang telah dicapai dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban pada tahun 2025 dengan hasil Provinsi Jawa Timur maupun Nasional. Dari beberapa indikator yang diterapkan pada perangkat daerah tidak semua diakomodir menjadi indikator Provinsi maupun Nasional. Dari tabel tersebut dapat diketahui Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban pada tahun 2025 lebih tinggi dari Provinsi Jawa Timur maupun Nasional. Sedangkan untuk NTP juga lebih tinggi dari Provinsi Jatim, namun masih di bawah angka Nasional. Demikian pula untuk pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, nilai capaian di atas merupakan capaian pada tahun 2024 dimana Kabupaten Tuban memiliki nilai pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur meskipun masih di bawah angka Nasional. Untuk capaian tahun 2025 masih belum diketahui angkanya, baik itu dari Kabupaten Tuban, Provinsi Jatim maupun Nasional karena menunggu rilis dari BPS. Sementara itu angka capaian PoU Kabpaten Tuban pada tahun 2025 lebih kecil daripada Provinsi Jawa Timur aupun Nasional. Hal ini berarti PoU Kab. Tuban lebih baik daripada Provinsi Jatim dan Nasional. Sedangkan untuk Nilai tambah, baik itu produk pertanian, peternakan maupun perikanan dan juga nilai IKM tidak ditemukan data untuk capaian Provinsi Jawa Timur maupun Nasional, kaena indikator ini tidak diakomodir oleh provinsi Jawa Timur dan Nasional.

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- a. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Dari hasil kinerja sasaran strategis yang telah dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban pada tahun 2025, menunjukkan bahwa tidak semua indikator dapat mencapai target. Dari 8 (delapan) indikator kinerja

baik itu tujuan maupun sasaran strategis, 3 (empat) indikator dapat melebihi target yaitu Nilai Tukar Petani, Nilai Tambah Produk Perikanan, Nilai tambah produk peternakan (sapi). Dan 1 (satu) indikator yaitu nilai tambah produk pertanian (padi) dapat mencapai target. Pencapaian ini disebabkan karena beberapa faktor diantaranya adanya peningkatan NTP per sub sector yang ditunjang dengan adanya program dari pemerintah pusat terkait dengan peningkatan target Luas Tambah Tanam (LTT) yang mampu mendorong peningkatan produktifitas padi. Selain itu peningkatan kapasitas kemampuan petani juga selalu diupayakan melalui pembelajaran sekolah lapang maupun agrobisnis. Bantuan pompanisasi dari Pemerintah Pusat juga mampu meningkatkan kemampuan produktifitas padi. Peningkatan ini tentunya tidak lepas dari dukungan semua pihak baik dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan stake holder lainnya serta dari masyarakat khususnya petani itu sendiri. Bantuan dari pemerintah baik itu dari kabupaten, provinsi maupun pusat selalu diberikan tiap tahunnya baik berupa sarana maupun prasarana pertanian guna mendukung peningkatan produksi dan produktivitas serta nilai tambah pertanian yang mampu mendongkrak kesejahteraan petani. Kebijakan-kebijakan terkait pertanian juga telah banyak diambil oleh pemerintah. Seperti halnya kebijakan terkait pupuk bersubsidi maupun permodalan usaha tani dengan bekerjasama dengan pihak perbankan yang memberikan suku bunga rendah untuk petani.

Sementara itu untuk produksi total perikanan terutama untuk perikanan tangkap dapat terus ditingkatkan dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan yang ramah lingkungan untuk nelayan. Adapun nilai tambah produk perikanan juga tercapai atas upaya yang telah dilakukan melalui bantuan fasilitasi perijinan untuk pengolahan produk perikanan dan sosialisasi serta pelatihan pengolahan produk hasil perikanan yang aman dan sehat untuk dikonsumsi sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk perikanan. Peningkatan Nilai tambah produk peternakan (sapi) juga ditunjang adanya pelatihan Juleha (Juru Sembelih Halal) yang diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban sehingga dapat meningkatkan animo masyarakat untuk membeli daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).

Di samping peningkatan/keberhasilan yang telah dicapai, terdapat 3 (tiga) indikator yang masih belum mencapai target

yaitu Indeks Ketahanan Pangan, Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU), dan juga Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Salah satu factor penyebab tidak tercapainya IKP yaitu dikarenakan adanya modernisasi indikator, yang awalnya 9 indikator bertambah menjadi 12 indikator. Pemutakhiran metodologi pengukuran ini mengacu pada pengukuran yang dikembangkan oleh internasional seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)), Global Food Security Index (GFSI) yang dikembangkan oleh The Economist Intelligence Unit (EIU), dan pengukuran ketahanan pangan yang dikembangkan oleh FOOD and Agriculture Organization (FAO). Dengan adanya tambahan indikator tersebut maka akan mengurangi angka komposit dari perhitungan IKP. Berdasarkan data backcasting tahun 2024 dari Badan Pangan Nasional dapat diketahui bahwa angka indeks ketersediaan menjadi faktor utama penurunan IKP di Kabupaten Tuban. Pada indeks ketersediaan ini terdiri dari 4 (empat) indikator yaitu rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan pangan (padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, sagu, pisang), rasio ketersediaan energi per kapita per hari terhadap standar kebutuhan, rasio ketersediaan protein hewani per kapita per hari terhadap standar kebutuhan, dan rasio Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) yang dimiliki terhadap CBPD berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dari 4 indikator tersebut, 3 diantaranya adalah indikator baru.

Selanjutnya indikator PoU dibandingkan dengan tahun sebelumnya pencapaian tahun 2025 mengalami penurunan (lebih baik), namun masih belum mencapai target karena di wilayah tertentu terutama di wilayah perikanan mengalami penurunan kuantitas konsumsi. Indikator IKM juga masih belum mencapai target karena dari 9 unsur penilaian masih terdapat satu unsur yang masuk dalam prioritas utama perbaikan yaitu unsur produk spesifikasi jenis layanan.

b. Upaya nyata dan/atau hambatannya atas pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan atas pencapaian kinerja, diantaranya dalam bidang perikanan berupa pemberian bantuan alat tangkap ikan ramah lingkungan, rehabilitasi TPI, rehabilitasi kolam di BBI Singgahan dan Rengel. Selain itu pemberian bantuan hibah berupa sarana dan prasarana pertanian juga terus ditingkatkan diantaranya pembangunan jaringan irigasi tersier, pompanisasi, pengembangan area tanam untuk bawang merah dan kacang tanah, pemberian UPPO, alsintan dan lain sebagainya. Dalam rangka ketahanan pangan dan penurunan

angka stunting diberikan bantuan kebun B2SA untuk 41 keluarga resiko stunting. Pelatihan Juleha (Juru Sembelih Halal), Sosialisasi NKV bagi pelaku usaha produksi peternakan, pemeriksaan kesehatan hewan secara rutin, pelaksanaan berbagai jenis kajian akademik diantaranya yaitu Kajian Akademik untuk Perhitungan Nilai Tambah, Integrated Farming, Updating Lahan Baku Sawah, FSVA, NBM, Skor PPH, dan Tambat Labuh.

Namun demikian, hambatan/kendala juga dialami dalam rangka pencapaian kinerja. Diantaranya mulai merebaknya Kembali kasus PMK pada hewan ternak, adanya efisiensi anggaran secara Nasional sehingga juga berpengaruh pada kuantitas dari pelayanan yang diberikan. Adanya kebijakan pemerintah Kabupaten terkait Perda Cadangan Pangan yang masih belum disahkan sehingga masih belum dapat ditentukan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten, dimana hal ini sangat berpengaruh pada indeks Ketahanan Pangan, dikarenakan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten merupakan salah satu factor yang dihitung dalam penentuan Indeks Ketahanan Pangan.

Selain itu pada tahun 2025 terdapat anggaran untuk fasilitasi BPJS Nelayan yang tidak terserap dikarenakan proses fasilitasi dialihkan ke OPD lain. Untuk Kajian Updating Lahan Baku Sawah juga masih belum optimal. Dari 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Tuban, baru 10 kecamatan yang dilakukan pembaruan data. Status desa agak rentan pangan di Kabupaten Tuban juga semakin bertambah, hal ini dikarenakan adanya penyesuaian formulasi dengan tambahan indikator baru.

c. Alternatif solusi atas upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Guna perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan maka perlu diambil kebijakan yang nantinya lebih membawa dampak positif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Diantaranya agar produksi pertanian dapat lebih meningkat maka perlu diadakan penelitian terkait analisa tanah di masing-masing kecamatan sehingga nantinya akan dapat diketahui potensi yang dapat dimaksimalkan dan teknologi yang harus digunakan agar lebih tepat sasaran. Selain itu pengembangan korporasi petani juga harus lebih ditingkatkan lagi ke daerah-daerah lain sesuai dengan spesifik lokasi. Pemberian bantuan atau fasilitasi permodalan petani dengan pihak perbankan yang dapat membantu petani untuk lebih

maju, fasilitasi pasar dan stabilisasi harga di tingkat petani dengan bekerja sama dengan pihak lain, baik itu sesama perangkat daerah maupun instansi di luar kedinasan.

Terkait dengan pelaksanaan kebun B2SA agar bantuan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan maka selanjutnya diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti desa maupun Dinas Sosial P3A. Begitupula dengan penguatan cadangan pangan dapat bekerjasama dengan pihak Bulog untuk penyerapan hasil panen petani terutama untuk padi dan jagung sehingga bisa meminimalisir peran tengkulak.

Guna meningkatkan nilai tambah baik bidang pertanian, peternakan maupun perikanan selanjutnya dapat diperbanyak bentuk kegiatan yang memiliki daya ungkit yang besar untuk masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan peningkatan minat pemuda dalam dunia pertanian, peternakan maupun perikanan. Adanya Integrated Farming yang telah diinisiasi diharapkan dapat menjadi laboratorium lapangan dalam pengembangan produk pertanian, perikanan maupun peternakan yang dapat mengungkit nilai tambah.

3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Secara rata-rata dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban telah efisien. Hal ini terlihat dari banyaknya program kegiatan yang dapat melebihi target atau dengan kata lainnya berkinerja di atas 100% dan dilakukan dengan anggaran yang kurang dari pagu yang telah disiapkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tujuan/sasaran /Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Pagu anggaran (Rp)	Realisasi Aggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)	(6)	(7)	(8=7/6*100)	(9=5-8)
Tujuan: Meningkatnya ketahanan pangan serta kesejahteraan petani dan nelayan	Indeks Ketahanan Pangan (indeks)	86,41	73,23					
	Nilai Tukar Petani (indeks)	116,48	119,01					
	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	2,19	2,18*)					
Sasaran: Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pertanian dan Perikanan serta Kemandirian Pangan	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	6,99	7,02					
	Nilai Tambah Produk Unggulan Pertanian (Padi) (Rupiah)	7.000	7.000					
	Nilai Tambah Produk Unggulan Peternakan (Sapi) (Rupiah)	36.750	37.516					
	Nilai Tambah Produk Perikanan (Rupiah)	26.000	26.550					
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor PPH Ketersediaan Pangan (%)	92,78	97	104,54	4.720.913.406	3.097.118.417	65,60	38,94
	Skor PPH Konsumsi Pangan (%)	95,2	93,37	98,08				
Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Ketersediaan energi per kapita (kkal/kap/hari)	3583	3.670	102,37	251.601.544	242.680.220	96,45	5,92
	Ketersediaan protein per kapita (gram/kap/hari)	108,2	126,8	102,43				
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	200	200	100	64.715.700	64.544.000	99,73	0,27
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	3	3	100	108.368.844	99.657.500	91,96	8,04

Tujuan/sasaran /Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Pagu anggaran (Rp)	Realisasi Aggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)	(6)	(7)	(8=7/6*100)	(9=5-8)
Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1	1	100	78.517.000	78.478.720	99,95	0,05
Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Total Cadangan Pangan Kab/Kota yang dikelola (Ton)	5	5	100	366.160.420	340.539.883	93	7
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	5	5	100	366.160.420	340.539.883	93	7
Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Konsumsi energi per kapita per hari	2100-2200	2.103	100,14	4.103.151.442	2.513.898.314	61,27	38,87
	Konsumsi protein per kapita per hari	55-60	62,35	113,36				
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1	1	100	95.914.442	95.726.250	99,80	0,2
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	106	41	38,68	4.007.237.000	2.418.172.064	60,35	-21,67
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase desa tahan pangan (kategori 5 dan 6)	100	12,5	12,5	105.986.242	105.746.770	99,77	-87,27
Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	1	1	100	88.837.492	88.600.520	99,73	0,27
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1	1	100	88.837.492	88.600.520	99,73	0,27
Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan yang mendukung penanganan kerawanan pangan yang menjadi kewenangan kab/kota	1	1	100	17.148.750	17.146.250	99,99	0,01

Tujuan/sasaran /Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Pagu anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)	(6)	(7)	(8=7/6*100)	(9=5-8)
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1	1	100	17.148.750	17.146.250	99,99	0,01
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	77,4	65,63	84,79	85.587.857	84.792.300	99,07	-14,28
Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diuji	80	83	103,75	85.587.857	84.792.300	99,07	4,68
Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1	1	100	70.555.357	70.292.600	99,63	0,37
Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1	1	100	15.032.500	14.499.700	96,46	3,54
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah total produksi perikanan tangkap	37.539,79	37.648,53	100,29	2.315.818.989	1.284.451.610	55,46	44,83
Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana usaha perikanan tangkap ramah lingkungan	4.093	4.093	100	1.239.466.750	944.003.410	76,16	23,84
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	1	100	16.405.000	16.334.000	99,57	0,43
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	704	704	100	1.223.061.750	927.669.410	75,85	24,15

Tujuan/sasaran /Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Pagu anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)	(6)	(7)	(8=7/6*100)	(9=5-8)
Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha	50	50	100	796.508.600	67.813.500	8,51	91,49
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang meningkat Kapasitasnya	5.419	0	0	746.856.600	18.161.500	2,43	-2,43
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	10	10	100	49.652.000	49.652.000	100	0
Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pendapatan retribusi tempat pelelangan ikan	750.000.000	825.322.500	110,04	267.259.639	260.050.700	97,30	12,74
Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	5	5	100	267.259.639	260.050.700	97,30	2,7
Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tanda daftar kapal perikanan yang di fasilitasi pengajuannya	250	250	100	12.584.000	12.584.000	100	0
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	100	12.584.000	12.584.000	100	0
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya kabupaten/kota	52.791,52	53.319,43	101	1.179.779.175	451.881.555	38,30	62,7
Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pembudidaya ikan yang mendapatkan pendampingan/pelatihan	350	350	100	71.655.950	69.287.775	96,70	3,3
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti	35	35	100	26.748.000	26.747.775	100	0

Tujuan/sasaran /Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Pagu anggaran (Rp)	Realisasi Aggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)	(6)	(7)	(8=7/6*100)	(9=5-8)
Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan							
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	20	20	100	44.907.950	42.540.000	94,73	5,27
Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) yang diterbitkan	50	50	100	12.255.250	12.245.750	99,92	0,08
Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	50	50	100	12.255.250	12.245.750	99,92	0,08
Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah benih ikan yang diproduksi (ekor)	3.921.170.000	3.921.500.000	100,01	1.095.867.975	370.348.030	33,79	66,22
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	100	14.504.000	14.504.000	100	0
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	3	3	100	958.047.100	240.253.850	25,08	74,92
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (dokumen)	30	30	100	81.546.875	73.820.180	90,52	9,48
Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan (unit)	3	3	100	27.810.000	27.810.000	100	0

Tujuan/sasaran /Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Pagu anggaran (Rp)	Realisasi Aggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)	(6)	(7)	(8=7/6*100)	(9=5-8)
Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan (dokumen)	1	1	100	13.960.000	13.960.000	100	0
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan (%)	100	100	100	11.586.975	11.174.975	96,44	3,56
Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah RTP yang diawasi (RTP)	50	50	100	11.586.975	11.174.975	96,44	3,56
Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	50	50	100	11.586.975	11.174.975	96,44	3,56
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah total produksi olahan hasil perikanan (Ton)	47.282	48.110,9	101,75	203.334.076	195.872.265	96,33	5,42
Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Skala Mikro dan Kecil yang memiliki tanda daftar usaha (Unit)	235	235	100	27.614.164	27.458.885	99,44	0,56
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)	1	1	100	27.614.164	27.458.885	99,44	0,56
Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang tersertifikasi (Unit usaha)	20	20	100	14.660.000	14.660.000	100	0

Tujuan/sasaran /Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Pagu anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)	(6)	(7)	(8=7/6*100)	(9=5-8)
Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil								
Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (unit usaha)	20	20	100	14.660.000	14.660.000	100	0
Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	ketersediaan bahan baku ikan olahan (ton)	45001	45.041	100,09	161.059.912	153.753.380	95,46	4,63
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	1.261	1.261	100	145.527.912	138.221.380	94,98	5,02
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (pelaku usaha)	100	100	100	15.532.000	15.532.000	100	0
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah total produksi produk peternakan (daging) (ton)	21.829	24.534,77	112,40	5.353.614.911	2.595.342.593	48,48	63,92
	Penurunan emisi GRK kumulatif bidang pertanian (Ton CO2 EQ)	544.663	639.459,87	117,40				
Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah pelaksanaan kegiatan pendukung peningkatan nilai tambah sektor pertanian (kegiatan)	2	2	100	3.417.343.009	2.164.227.113	63,33	36,67
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas,	4	4	100	3.336.849.165	2.083.798.697	62,45	37,55

Tujuan/sasaran /Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Pagu anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)	(6)	(7)	(8=7/6*100)	(9=5-8)
Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Teknologi dan Spesifik Lokasi (laporan)							
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (laporan)	12	12	100	80.493.844	80.428.416	99,92	0,08
Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis sumber daya genetik hewan yang dikelola (Jenis)	3	3	100	51.649.600	51.514.446	99,74	0,26
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	1	1	100	51.649.600	51.514.446	99,74	0,26
Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produksi pakan ternak (ton)	60	125,8	209,67	1.838.446.025	333.667.290	18,15	191,52
Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (laporan)	25	25	100	1.728.871.625	224.530.940	12,99	87,01
Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar (laporan)	4	4	100	109.574.400	109.136.350	99,60	0,4
Kegiatan Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase Petshop Yang Memenuhi Standar Mutu. Khasiat dan Keamanan Obat Hewan Yang Beredar (%)	46,67	46,67	100	9.695.000	9.575.000	98,76	1.24
Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar (laporan)	4	4	100	9.695.000	9.575.000	98,76	1,24
Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan	Jumlah kelahiran ternak hasil IB (ekor)	93.500	75.712	80,97	36.481.277	36.358.744	99,66	-18,69

Tujuan/sasaran /Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Pagu anggaran (Rp)	Realisasi Aggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)	(6)	(7)	(8=7/6*100)	(9=5-8)
dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota								
Pengawasan produksi benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan/pakan	Jumlah Pengawasan produksi benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan/pakan (laporan)	4	4	100	36.481.277	36.358.744	99,66	0,34
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah produksi unggulan pertanian (Ton)	1.708.134			7.998.476.583	6.977.310.317,36	87,23	
	Produktivitas padi per hektar/tahun (Kuintal/hektar)	62,209	62,209	100				
Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas Tambah Tanam (LTT) Jagung (Hektar)	130.788	144.885	110,78	2.135.855.188	1.703.315.573	79,75	31.03
	Luas Tambah Tanam (LTT) Padi (Hektar)	105.562	115.884	109,78				
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (laporan)	4	4	100	1.739.756.030	1.311.205.672	75,37	24,63
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	1	1	100	396.099.158	392.109.901	98,99	1,01
Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah pembangunan prasarana pertanian (unit)	11	9	81,82	5.862.621.395	5.273.994.744,36	89,96	-8,14
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	5	3	60	1.238.750.000	740.656.950	59,79	0,21
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (unit)	4	4	100	4.142.614.955	4.063.876.350	98,10	1,9

Tujuan/sasaran /Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Pagu anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)	(6)	(7)	(8=7/6*100)	(9=5-8)
Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (unit)	2	2	100	481.256.440	469.461.444,36	97,55	2,45
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (%)	100	100	100	2.641.421.931	2.600.952.524	98,47	1,53
Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ternak yang dilayani (ekor)	6000	6.000	100	407.138.731	405.877.023	99,69	0,31
Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (laporan)	20	20	100	407.138.731	405.877.023	99,69	0,31
Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ternak yang diawasi dan diperiksa di pasar hewan (ekor)	1.800	1800	100	22.364.360	21.905.500	97,95	2,05
Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya (laporan)	4	4	100	22.364.360	21.905.500	97,95	2,05
Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan jasa laboratorium dan medik veteriner (laporan)	2	2	100	1.816.540.825	1.784.398.067	98,23	1,77
Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (laporan)	2	2	100	66.940.825	65.177.000	97,37	2,63
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (laporan)	2	2	100	1.749.600.000	1.719.221.067	98,26	1,74

Tujuan/sasaran /Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Pagu anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)	(6)	(7)	(8=7/6*100)	(9=5-8)
Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah produk yang memenuhi standar persyaratan teknis kesmavet (produk)	10	10	100	307.448.733	301.981.334	98,22	1,78
Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (laporan)	20	20	100	290.117.856	285.002.644	98,24	1,76
Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan (orang)	30	30	100	7.019.063	7.010.000	99,87	0,13
Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik (unit usaha)	220	220	100	10.311.814	9.968.690	96,67	3,33
Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pelaku Usaha/peternak yang menerapkan persyaratan teknis kesejahteraan hewan (unit)	35	35	100	87.929.282	86.790.600	98,71	1,29
Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan (unit)	35	35	100	87.929.282	86.790.600	98,71	1,29
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana pertanian (%)	100	150	150	204.231.314	202.823.000	99,31	50,69
Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas penanganan bencana pertanian (Ha)	600,00	900	150	204.231.314	202.823.000	99,31	50,69
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	600	900	150	187.045.064	186.210.000	99,55	50,45
Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (laporan)	2	2	100	17.186.250	16.613.000	96,66	3,34

Tujuan/sasaran /Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Pagu anggaran (Rp)	Realisasi Aggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)	(6)	(7)	(8=7/6*100)	(9=5-8)
Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase usaha pertanian yang berizin (%)	100	15,95	15,95	7.937.500	7.917.500	99,75	-83,8
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi izin usaha pertanian yang dikeluarkan (laporan)	4	4	100	7.937.500	7.917.500	99,75	0,25
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (laporan)	4	4	100	7.937.500	7.917.500	99,75	0,25
Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kenaikan kelas kelompok tani Kelas Utama (%)	9,79	8,80	89,89	5.305.873.512	5.040.271.713	94,99	-5,1
Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani yang menerapkan teknologi berdasarkan rekomendasi (%)	100	100	100	5.305.873.512	5.040.271.713	94,99	5,01
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit)	20	20	100	1.189.288.000	1.187.632.190	99,86	0,14
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit)	400	400	100	807.310.000	632.953.226	78,40	21,60
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (unit)	5	5	100	1.079.353.512	1.065.629.960	98,73	1,27
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (unit)	31	31	100	1.775.404.000	1.770.256.337	99,71	0,29
Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (orang)	90	90	100	454.518.0000	383.800.000	84,44	15,56
SASARAN: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	87,73	87,07	99,25	34.431.239.490	28.569.321.071	82,96	16,29

Tujuan/sasaran /Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Pagu anggaran (Rp)	Realisasi Aggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)	(6)	(7)	(8=7/6*100)	(9=5-8)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP Perangkat Daerah (poin)	84,35	84,40	100,06	34.431.239.490	28.569.321.071	82,96	17,1
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun (Dokumen)	9	9	100	286.019.764	280.178.542	97,96	2,04
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6	100	207.497.200	207.362.042	99,93	0,070,32
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	12	100	25.122.564	25.041.000	99,68	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	7	7	100	53.400.000	47.775.500	89,47	10,53
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun (jenis)	9	9	100	26.991.961.313	22.063.026.794	81,74	18,26
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	283	283	100	26.888.628.813	21.963.776.294	81,68	18,22
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)	2	2	100	85.480.500	81.517.000	95,36	4,64
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4	4	100	3.700.500	3.686.000	99,61	0,39
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	4	100	5.225.500	5.187.500	99,27	0,73
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	2	2	100	5.225.500	5.185.000	99,22	0,78

Tujuan/sasaran /Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Pagu anggaran (Rp)	Realisasi Aggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)	(6)	(7)	(8=7/6*100)	(9=5-8)
	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)							
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	100	3.700.500	3.675.000	99,31	0,69
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis Layanan Kepegawaian (jenis)	1	1	100	976.000	966.000	98,98	1,02
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya (paket)	1	1	100	976.000	966.000	98,98	1,02
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Layanan Pengadaan Administrasi Umum (jenis)	6	6	100	593.327.888	577.234.824	97,29	2,71
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	100	34.997.946	34.992.500	99,98	0,02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1	1	100	124.978.972	118.421.734	94,75	5,25
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	3	3	100	171.208.310	171.178.780	99,98	0,02
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	1	1	100	117.030.000	117.023.250	99,99	0,01
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	100	32.612.660	27.942.640	85,68	14,32
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	12	12	100	112.500.000	107.675.920	95,71	4,29
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah (jenis)	53	53	100	67.867.612	67.330.110	99,21	0,79
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	53	53	100	67.867.612	67.330.110	99,21	0,79
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Jasa Penunjang (jenis)	5	5	100	3.816.079.725	3.031.294.480	79,43	20,57

Tujuan/sasaran /Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Pagu anggaran (Rp)	Realisasi Aggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)	(6)	(7)	(8=7/6*100)	(9=5-8)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12	12	100	958.057.345	834.949.960	87,15	12,85
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12	12	100	2.858.022.380	2.196.344.520	76,85	23,15
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah (jenis)	4	4	100	2.675.007.188	2.549.290.321	95,30	4,70
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	88	88	100	365.074.954	309.984.560	84,91	15,09
Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	100	100	100	10.000.000	9.652.000	96,52	3,48
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	100	100	100	95.020.000	94.630.250	99,59	0,41
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	14	14	100	2204912234	2135023511	96,83	3,17

Tabel 3.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban mampu melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 6.231.316.684 atau sebesar 8,8%. Pagu anggaran APBD tahun 2025 sebesar Rp. 70.797.118.645,- menjadi Rp. 64.565.801.961,- . Dampak dari adanya efisiensi tidak terlalu berpengaruh signifikan pada pencapaian kinerja . Hal ini dikarenakan efisiensi tidak dilakukan pada rekening belanja utama, namun pada rekening belanja pendukung seperti penyediaan makan dan minum rapat, penyediaan alat tulis kantor, serta perjalanan daerah. Pelaksanaan rapat lebih banyak dilakukan melalui daring/online sehingga mampu memangkas biaya perjalanan dinas. Demikian pula dengan pelaksanaan rapat di lingkup DKP2P dengan mengurangi biaya makan dan minum melalui pemberian snack saja tanpa makan dan tanpa uang transport bagi peserta rapat (petani atau nelayan).

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Dari 14 program yang dilaksanakan oleh DKP2P pada tahun 2025, terdapat beberapa program, kegiatan maupun sub kegiatan yang masih belum mencapai target, yaitu :

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, terdapat 1 indikator yaitu Skor PPH Konsumsi Pangan (%) dengan capaian 98,08%. Hal ini dikarenakan konsumsi penduduk Tuban terutama wilayah perikanan masih memerlukan peningkatan konsumsi sayur dan buah.
2. Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, dari target sebanyak 106 tercapai 41 laporan. Hal ini dikarenakan sebanyak 65 kelompok dianulir karena masuk dalam kategori pengembangan (sudah pernah menerima bantuan yang sama sebelumnya).

3. Program Penanganan Kerawanan Pangan, dari target 100% hanya atercapai 12,5%. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan status desa menjadi agak rentan pangan sehingga kategori desa tahan dan sangat tahan pangan mengalami penurunan;
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan, dengan capaian sebesar 84,79% yang disebabkan masih banyak pangan segar hewani yang tidak aman untuk dikonsumsi
5. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil, capaian 0% karena untuk fasilitasi BPJS Nelayan dialihkan ke OPD lain
6. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan capain sebesar 80,97%, hal ini dikarenakan PMK dan LSD meninggalkan efek jangka panjang: gangguan reproduksi yang menyebabkan kawin berulang dan Peternak trauma meelihara sapi lebih banyak lagi.
7. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian dan Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani hanya tercapai 60% karena terdapat 2 kelompok yang tidak memenuhi persyaratan.
8. Program Perizinan Usaha Pertanian hanya tercapai sebesar 15,95% usaha pertanian yang memiliki izin
9. Program Penyuluhan Pertanian tercapai % karena Jumlah kelompok tani dan wilayah binaan tidak sebanding dengan jumlah penyuluh.

3.2 Realisasi Anggaran

Tujuan/sasaran /Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Pagu anggaran (Rp)	Realisasi Aggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
(1)	(6)	(7)	(8=7/6*100)
Tujuan: Meningkatnya ketahanan pangan serta kesejahteraan petani dan nelayan			
Sasaran: Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pertanian dan Perikanan serta Kemandirian Pangan			
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	4.720.913.406	3.097.118.417	65,60
Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam	251.601.544	242.680.220	96,45

Tujuan/sasaran /Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Pagu anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
(1)	(6)	(7)	(8=7/6*100)
rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	64.715.700	64.544.000	99,73
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	108.368.844	99.657.500	91,96
Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	78.517.000	78.478.720	99,95
Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	366.160.420	340.539.883	93
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	366.160.420	340.539.883	93
Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	4.103.151.442	2.513.898.314	61,27
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	95.914.442	95.726.250	99,80
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4.007.237.000	2.418.172.064	60,35
Program Penanganan Kerawanan Pangan	105.986.242	105.746.770	99,77
Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	88.837.492	88.600.520	99,73
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	88.837.492	88.600.520	99,73
Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	17.148.750	17.146.250	99,99
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	17.148.750	17.146.250	99,99
Program Pengawasan Keamanan Pangan	85.587.857	84.792.300	99,07
Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	85.587.857	84.792.300	99,07
Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	70.555.357	70.292.600	99,63
Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	15.032.500	14.499.700	96,46

Tujuan/sasaran /Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Pagu anggaran (Rp)	Realisasi Aggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
(1)	(6)	(7)	(8=7/6*100)
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.315.818.989	1.284.451.610	55,46
Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.239.466.750	944.003.410	76,16
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	16.405.000	16.334.000	99,57
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	1.223.061.750	927.669.410	75,85
Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	796.508.600	67.813.500	8,51
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	746.856.600	18.161.500	2,43
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	49.652.000	49.652.000	100
Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	267.259.639	260.050.700	97,30
Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	267.259.639	260.050.700	97,30
Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12.584.000	12.584.000	100
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	12.584.000	12.584.000	100
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.179.779.175	451.881.555	38,30
Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	71.655.950	69.287.775	96,70
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	26.748.000	26.747.775	100
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	44.907.950	42.540.000	94,73
Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1	12.255.250	12.245.750	99,92

Tujuan/sasaran /Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Pagu anggaran (Rp)	Realisasi Aggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
(1)	(6)	(7)	(8=7/6*100)
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12.255.250	12.245.750	99,92
Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.095.867.975	370.348.030	33,79
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	14.504.000	14.504.000	100
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	958.047.100	240.253.850	25,08
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	81.546.875	73.820.180	90,52
Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	27.810.000	27.810.000	100
Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	13.960.000	13.960.000	100
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	11.586.975	11.174.975	96,44
Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	11.586.975	11.174.975	96,44
Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	11.586.975	11.174.975	96,44
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	203.334.076	195.872.265	96,33
Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	27.614.164	27.458.885	99,44
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	27.614.164	27.458.885	99,44
Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil	14.660.000	14.660.000	100

Tujuan/sasaran /Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Pagu anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
(1)	(6)	(7)	(8=7/6*100)
Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			
Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	14.660.000	14.660.000	100
Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	161.059.912	153.753.380	95,46
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	145.527.912	138.221.380	94,98
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.532.000	15.532.000	100
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	5.353.614.911	2.595.342.593	48,48
Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.417.343.009	2.164.227.113	63,33
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3.336.849.165	2.083.798.697	62,45
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	80.493.844	80.428.416	99,92
Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	51.649.600	51.514.446	99,74
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	51.649.600	51.514.446	99,74
Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.838.446.025	333.667.290	18,15
Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1.728.871.625	224.530.940	12,99
Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	109.574.400	109.136.350	99,60

Tujuan/sasaran /Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Pagu anggaran (Rp)	Realisasi Aggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
(1)	(6)	(7)	(8=7/6*100)
Kegiatan Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	9.695.000	9.575.000	98,76
Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	9.695.000	9.575.000	98,76
Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	36.481.277	36.358.744	99,66
Pengawasan produksi benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan/pakan	36.481.277	36.358.744	99,66
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	7.998.476.583	6.977.310.317,36	87,23
Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	2.135.855.188	1.703.315.573	79,75
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1.739.756.030	1.311.205.672	75,37
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	396.099.158	392.109.901	98,99
Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	5.862.621.395	5.273.994.744,36	89,96
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1.238.750.000	740.656.950	59,79
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	4.142.614.955	4.063.876.350	98,10
Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	481.256.440	469.461.444,36	97,55
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2.641.421.931	2.600.952.524	98,47
Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	407.138.731	405.877.023	99,69
Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	407.138.731	405.877.023	99,69
Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan	22.364.360	21.905.500	97,95

Tujuan/sasaran /Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Pagu anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
(1)	(6)	(7)	(8=7/6*100)
Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota			
Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	22.364.360	21.905.500	97,95
Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.816.540.825	1.784.398.067	98,23
Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	66.940.825	65.177.000	97,37
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1.749.600.000	1.719.221.067	98,26
Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	307.448.733	301.981.334	98,22
Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	290.117.856	285.002.644	98,24
Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	7.019.063	7.010.000	99,87
Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	10.311.814	9.968.690	96,67
Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	87.929.282	86.790.600	98,71
Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	87.929.282	86.790.600	98,71
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	204.231.314	202.823.000	99,31
Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	204.231.314	202.823.000	99,31
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	187.045.064	186.210.000	99,55
Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	17.186.250	16.613.000	96,66
Program Perizinan Usaha Pertanian	7.937.500	7.917.500	99,75
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.937.500	7.917.500	99,75
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	7.937.500	7.917.500	99,75

Tujuan/sasaran /Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Pagu anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
(1)	(6)	(7)	(8=7/6*100)
Program Penyuluhan Pertanian	5.305.873.512	5.040.271.713	94,99
Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	5.305.873.512	5.040.271.713	94,99
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	1.189.288.000	1.187.632.190	99,86
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	807.310.000	632.953.226	78,40
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1.079.353.512	1.065.629.960	98,73
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	1.775.404.000	1.770.256.337	99,71
Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	454.518.0000	383.800.000	84,44
SASARAN: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	34.431.239.490	28.569.321.071	82,96
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	34.431.239.490	28.569.321.071	82,96
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	286.019.764	280.178.542	97,96
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	207.497.200	207.362.042	99,93
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.122.564	25.041.000	99,68
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.400.000	47.775.500	89,47
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.991.961.313	22.063.026.794	81,74
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.888.628.813	21.963.776.294	81,68
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	85.480.500	81.517.000	95,36
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.700.500	3.686.000	99,61
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.225.500	5.187.500	99,27
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.225.500	5.185.000	99,22

Tujuan/sasaran /Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Pagu anggaran (Rp)	Realisasi Aggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
(1)	(6)	(7)	(8=7/6*100)
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.700.500	3.675.000	99,31
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	976.000	966.000	98,98
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	976.000	966.000	98,98
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	593.327.888	577.234.824	97,29
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	34.997.946	34.992.500	99,98
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	124.978.972	118.421.734	94,75
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	171.208.310	171.178.780	99,98
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	117.030.000	117.023.250	99,99
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	32.612.660	27.942.640	85,68
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	112.500.000	107.675.920	95,71
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Pemerintah Daerah	67.867.612	67.330.110	99,21
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67.867.612	67.330.110	99,21
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.816.079.725	3.031.294.480	79,43
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	958.057.345	834.949.960	87,15
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.858.022.380	2.196.344.520	76,85
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.675.007.188	2.549.290.321	95,30
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	365.074.954	309.984.560	84,91
Pemeliharaan Mebel	10.000.000	9.652.000	96,52
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	95.020.000	94.630.250	99,59
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2204912234	2135023511	96,83

Tabel 3.7 Realisasi Anggaran tahun 2025

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil analisa terhadap capaian kinerja dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan pada tahun 2025 terdapat 3 (tiga) indikator kinerja utama yang masih belum mampu mencapai target yaitu Indeks Ketahanan Pangan, Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). IKP belum tercapai dikarenakan adanya tambahan indikator perhitungan sehingga berpengaruh pada indeks komposit. PoU belum mencapai target karena di wilayah tertentu terutama di wilayah perikanan mengalami penurunan kuantitas konsumsi. Indikator IKM juga masih belum mencapai target karena dari 9 unsur penilaian masih terdapat satu unsur yang masuk dalam prioritas utama perbaikan yaitu unsur produk spesifikasi jenis layanan.

Sementara itu, terdapat satu indikator yaitu Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menunggu rilis dari BPS Kab. Tuban. Sedangkan indikator Nilai Tambah Produk Unggulan Pertanian-Padi tercapai sesuai target di angka 7.000 rupiah. Dan 3 indikator lainnya dapat melampaui target yaitu Nilai Tukar Petani dengan capaian 102,17% yang dipengaruhi oleh adanya peningkatan NTP per sub sektor. Indikator Nilai Tambah Produk Perikanan mencapai 102,12% dikarenakan adanya peningkatan hasil produksi perikanan. Indikator Nilai Tambah Produk Unggulan Peternakan-Sapi juga mencapai 102,08%, adanya pelatihan Juleha (Juru SEmbelih Halal) yang diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban dapat meningkatkan animo masyarakat untuk membeli daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).

4.2 Rekomendasi Tindak Lanjut

Dalam mewujudkan kinerja agar lebih baik lagi maka perlu dilakukan:

1. Meningkatkan hasil produksi pertanian khususnya untuk hortikultura melalui pengembangan lahan sesuai dengan spesifik lokasi melalui korporasi petani maupun lainnya
2. Pemilihan dan penggunaan bibit unggul yang mampu beradaptasi dengan perubahan cuaca.
3. Peningkatan penanggulangan dan pencegahan penyakit menular pada hewan
4. Edukasi masyarakat terkait kebutuhan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA).
5. Peningkatan pemanfaatan lahan pekarangan melalui Pekarangan Pangan Lestari (P2L) berbasis sumber daya lokal.
6. Optimalisasi Integrated Farming sebagai laboratorium lapang untuk pengembangan produk pertanian, peternakan dan perikanan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban Tahun 2025 disusun dengan harapan dapat memberikan gambaran tentang kinerja secara keseluruhan.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TUBAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EKO JULIANTO, S.STP, MM
NIK : 3523150110770001
NIP : 197710011997011001
Jabatan : Kepala Dinas
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Aditya Halindra Faridzky, SE
Jabatan : Bupati Tuban

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama bersedia di berikan sanksi oleh Pihak Kedua berupa pengurangan penerimaan tambahan penghasilan pegawai, pemberhentian dari jabatan, dan sanksi lainnya atas ketidakberhasilan dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tanpa menuntut apapun.

Pihak Kedua,
Bupati Tuban

Aditya Halindra Faridzky, SE

Tuban, 17 Januari 2025

Pihak Pertama,
Kepala Dinas



EKO JULIANTO, S.STP, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 197710011997011001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TUBAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EKO JULIANTO, S.STP, MM
NIK : 3523150110770001
NIP : 197710011997011001
Jabatan : Kepala Dinas
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Aditya Halindra Faridzky, SE
Jabatan : Bupati Tuban

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama bersedia di berikan sanksi oleh Pihak Kedua berupa pengurangan penerimaan tambahan penghasilan pegawai, pemberhentian dari jabatan, dan sanksi lainnya atas ketidakberhasilan dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tanpa menuntut apapun.

Pihak Kedua,
Bupati Tuban

Aditya Halindra Faridzky, SE

Tuban, 17 Januari 2025

Pihak Pertama,
Kepala Dinas

EKO JULIANTO, S.STP, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 197710011997011001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TUBAN

Sasaran/Indikator	Target
1. Meningkatnya produktifitas tanaman pangan dan produksi unggulan pertanian	
- Produktifitas pertanian per hektar per tahun (padi)	62,205 Kuintal/Hektar
- Jumlah produksi unggulan pertanian	1.726.024 Ton
- Jumlah populasi ternak	19.056.469 Ekor
2. Meningkatnya produksi potensi unggulan perikanan	
- Jumlah Total Produksi Perikanan	90.493,49 Ton
- Nilai tambah produk perikanan	26.000 Rp/Kg
3. Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan konsumsi pangan	
- Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan	97,8 Poin
- Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	94,9 Poin

Program	Anggaran	Keterangan
1. Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.316.849.300	APBD
2. Pengelolaan Perikanan Budidaya	541.514.250	APBD
3. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	25.000.000	APBD
4. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	430.000.000	APBD
5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	42.257.724.995	APBD
6. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	5.225.800.000	APBD/ DAK/ DBHCHT
7. Penyuluhan Pertanian	3.413.779.500	APBD
8. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	7.536.850.600	APBD/ DBHCHT/ DAK
9. Perizinan Usaha Pertanian	37.000.000	APBD
10. Pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian	270.000.000	APBD
11. Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2.802.100.000	APBD/ DAK
12. Penanganan Kerawanan Pangan	130.000.000	APBD
13. Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	5.290.500.000	APBD/ DAK
14. Pengawasan Keamanan Pangan	120.000.000	APBD
JUMLAH	70.397.118.645	

Pihak Kedua,
Bupati Tuban


Aditya Halindra Faridzky, SE

Tuban, 17 Januari 2025
Pihak Pertama,
Kepala Dinas


EKO JULIANTO, S.STP. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197710011997011001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TUBAN

Sasaran/Indikator	Target
1. Meningkatnya produktifitas tanaman pangan dan produksi unggulan pertanian	
- Produktifitas pertanian per hektar per tahun (padi)	62,205 Kuintal/Hektar
- Jumlah produksi unggulan pertanian	1.726.024 Ton
- Jumlah populasi ternak	19.056.469 Ekor
2. Meningkatnya produksi potensi unggulan perikanan	
- Jumlah Total Produksi Perikanan	90.493,49 Ton
- Nilai tambah produk perikanan	26.000 Rp/Kg
3. Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan konsumsi pangan	
- Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan	97,8 Poin
- Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	94,9 Poin

Program	Anggaran	Keterangan
1. Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.316.849.300	APBD
2. Pengelolaan Perikanan Budidaya	541.514.250	APBD
3. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	25.000.000	APBD
4. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	430.000.000	APBD
5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	42.257.724.995	APBD
6. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	5.225.800.000	APBD/ DAK/ DBHCHT
7. Penyuluhan Pertanian	3.413.779.500	APBD
8. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	7.536.850.600	APBD/ DBHCHT/ DAK
9. Perizinan Usaha Pertanian	37.000.000	APBD
10. Pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian	270.000.000	APBD
11. Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2.802.100.000	APBD/ DAK
12. Penanganan Kerawanan Pangan	130.000.000	APBD
13. Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	5.290.500.000	APBD/ DAK
14. Pengawasan Keamanan Pangan	120.000.000	APBD
JUMLAH	70.397.118.645	

Pihak Kedua,
Bupati Tuban


Aditya Halindra Faridzky, SE

Tuban, 17 Januari 2025
Pihak Pertama,
Kepala Dinas


EKO JULIANTO, S.STP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197710011997011001



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
JI. MASTRIP NO. 05 TELP (0356) 322086
TUBAN 6 2 3 1 5

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TUBAN

NOMOR : 000.7.7.1/ 03 /KPTS/414.106.1/2025

TENTANG

TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TUBAN

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TUBAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban, perlu disusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban Tahun 2022 dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 154);
- 14. Peraturan Bupati Tuban Nomor 50 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022 Seri D Nomor 22).

MEMUTUSKAN,

- | | | |
|------------|----|---|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini; |
| KEDUA | : | Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut : |
| | a. | Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meliputi: Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan; |

- b. Mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja;
- c. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/ dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun selambat-lambatnya bulan Januari pada tahun berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

KEEMPAT : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat Pelaksana Pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tuban
Pada tanggal : 03 Januari 2025

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TUBAN


EKO JULIANTO, S.STP M.M
NIP. 19660721 198602 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TUBAN
NOMOR : 000.7.7.1/ 03 /KPTS/414.106.1/2025
TENTANG
TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PADA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TUBAN

TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TUBAN

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan Organik
1	Penanggung Jawab	Kepala Dinas
2.	Ketua	Sekretaris
3.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Kesehatan Hewan
4.	Anggota	1. Kepala Bidang Sarana Pertanian 2. Kepala Bidang Penyuluhan dan Prasarana Pertanian 3. Kepala Bidang Perikanan 4. Kepala Bidang Ketahanan Pangan 5. JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda 6. JF Perencana Ahli Muda 7. Kasubbag Umum dan Kepegawaian 8. JF Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda 9. JF Medik Veteriner Ahli Muda 10. JF Penyuluh Pertanian Ahli Muda 11. JF Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda 12. JF Analis Prasarana Dan Sarana Pertanian Ahli Muda 13. JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda 14. JF Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda 15. JF Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda 16. JF Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda 17. JF Analis Akuakultur Ahli Muda 18. Ka. UPTD Rumah Potong Hewan 19. Kasubbag TU UPTD Rumah Potong Hewan 20. Ka. UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan 21. Kasubbag TU UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan IB 22. Ka. UPTD Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan 23. Kasubbag TU UPTD Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan 24. Ka. UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar/Air Payau 25. Kasubbag TU UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar/Air Payau 26. Ka. UPTD Produksi, Benih Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura 27. Kasubbag TU UPTD Produksi, Benih Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TUBAN


EKO JULIANTO, S.STP M.M
NIP. 19660721 198602 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Nomor SOP	:	
Tanggal Pembuatan	:	2 Januari 2025
Tanggal Revisi	:	-
Tanggal Pengesahan	:	3 Januari 2025
Disahkan Oleh	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN  EKO JULIANTO, S.STP., M.M NIP. 197710011 99701 1 001	
Nama SOP	Penyusunan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4846);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Bupati Tuban Nomor 50 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban;

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kewenangan dalam Penyusunan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
2. Memiliki Kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kinerja OPD.

Keterkaitan

1. SOP Perjanjian Kinerja

Peralatan/Perlengkapan

1. Renstra OPD
2. Format penyusunan LKjIP
3. Dokumen Perjanjian Kinerja
4. Data dan Informasi Capaian Kinerja OPD
5. Laporan Realisasi Keuangan
6. Perangkat Komputer

Peringatan

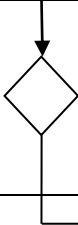
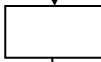
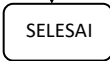
1. Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan LKjIP ini tidak berjalan lancar.

Pencatatan dan Pendataan

1. Indikator Kinerja, target, realisasi, dan presentase capaian kinerja

SOP : PENYUSUNAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
		Kepala Dinas	Sekretaris	JF Perencana	Staf/Jabatan Fungsional Umum	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Memerintahkan penyusunan LKjIP		MULAI			Disposisi surat	10 Menit	Disposisi surat	-
2.	Membuat format pengumpulan data dan informasi kinerja dari masing-masing bidang dan sekretariat					Format penyusunan LKjIP	2 Jam	Format penyusunan LKjIP	-
3.	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi kinerja kepada masing-masing bidang dan sekretariat					Format penyusunan LKjIP	1 Jam	Format penyusunan LKjIP	-
4.	Menghimpun format data dan informasi kinerja dari masing-masing bidang dan sekretariat					Format penyusunan LKjIP	3 Jam	Format penyusunan LKjIP	-
5.	Menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi kinerja yang telah terkumpul					Format penyusunan LKjIP	4 Hari	Draft LKjIP	SOP perjanjian kinerja
6.	Membuat Dokumen LKjIP					Draft LKjIP	2 Hari	Dokumen LKjIP	SOP perjanjian kinerja
7.	Mengoreksi Dokumen LKjIP					Dokumen LKjIP	1 Hari	Dokumen LKjIP	-
8.	Menyampaikan Dokumen LKjIP kepada Kadis untuk memintakan persetujuan					Dokumen LKjIP	1 Jam	Dokumen LKjIP	Konsep LKjIP

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
		Kepala Dinas	Sekretaris	JF Perencana	Staf/Jabatan Fungsional Umum	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	Penandatanganan dokumen LKjIP oleh Kadis kemudian diteruskan ke JF Perencana					Dokumen LKJIP	10 Menit	Disposisi persetujuan dokumen LKjIP	Dokumen LKjIP
10.	Membuat surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat, kemudian diserahkan ke staf untuk dikirimkan ke alamat yang dituju					Konsep surat pengantar	15 Menit	Surat pengantar	-
11.	Mengantar surat, menggandakan dan mengarsipkan Dokumen LKjIP					Dokumen LKjIP	1 Jam	Dokumen LKjIP	-

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TUBAN**



EKO JULIANTO, S.STP., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 197710011 99701 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Jl. Mastrip No. 05 Tuban Jawa Timur 62315 Telepon (0356) 322086
Laman : <https://dkp2p.tubankab.go.id/> , Pos-el disperta@tubankab.go.id

Tuban, 5 Januari 2026

Nomor : 000.8.6.3/ *73* /414.106.1/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan Rapat Evaluasi
Capaian LKJIP Tahun 2025

Yth. Saudara Sekretaris dan
Kepala Bidang beserta
JF Di Lingkup DKP2P
Kabupaten Tuban

di –
TUBAN

Dalam rangka tertib Adminstrasi penyusunan Capaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2024, sehubungan dengan itu dimohon dengan hormat kehadiran saudara beserta JF dan atau staf yang mengampu kegiatan APBD 2025 besok:

Hari : Selasa
Tanggal : 6 Januari 2026
Acara : agenda Rapat Evaluasi dan penyusunan LKJiP 2025,
Tempat : Ruang Pertemuan Dewi Sri Lt. 2 DKP2P

Keterangan :

1. Pelaksanaan evaluasi dimulai Pukul 08.00 WIB
2. Membawa DPPA APBD 2025.
3. Membawa Laptop.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TUBAN



EKO JULIANTO, S.STP M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19771001 199701 1 001

NOTULEN
RAPAT PEMENUHAN DOKUMEN SAKIP TAHUN 2025
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TUBAN

Hari/tanggal : Selasa, 6 Januari 2026
 Jam : 09.00 WIB s.d 15.00 WIB
 Tempat : Ruang Pertemuan Kepala DKP2P Lantai II
 Acara : Rapat Evaluasi dan Penyusunan LKIP Tahun 2025
 Pimpinan Rapat : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
 Peserta : 12 orang pejabat struktural, JF dan Staf Bidang
 Susunan Acara :

1. Pembukaan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2. Pembahasan Program Kegiatan masing-masing bidang
3. Pembahasan Capaian Kinerja tiap bidang
4. Pembahasan kendala yang dialami bidang
5. Penutup

Hasil / Kesimpulan :

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi tahun 2025*)	% Capaian
	Tujuan : Meningkatnya ketahanan pangan serta kesejahteraan petani dan nelayan	Indeks Ketahanan Pangan	86,41	73,23	84,75
		Nilai Tukar Petani	116,48	119,01	102,17
		Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,19	2,18 *)	
	Sasaran : Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian dan perikanan serta kemandirian pangan	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU)	6,99	7,02	99,57
		Nilai Tambah Produk Perikanan (Rupiah)	26.000	26.550	102,12
		Nilai Tambah Produk Unggulan Pertanian-Padi (Rupiah)	7.000	7.000	100
		Nilai Tambah Produk Unggulan	36.750	37.516	102,08

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi tahun 2025*)	% Capaian
		Peternakan-Sapi (Rupiah)			
	Sasaran: Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,73	87,07	99,25

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa beberapa indikator kinerja dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban pada tahun 2025 masih belum dapat mencapai target, yaitu Indeks Ketahanan Pangan. Ketidak tercapaian ini dikarenakan adanya perbedaan formulasi dengan tahun-tahun sebelumnya yang semula terdiri dari 9 variabel menjadi 12 variabel, sehingga berpengaruh pada indeks kompositnya. Selanjutnya indikator PoU dibandingkan dengan tahun sebelumnya pencapaian tahun 2025 mengalami penurunan (lebih baik), namun masih belum mencapai target karena di wilayah tertentu terutama di wilayah perikanan mengalami penurunan kuantitas konsumsi. Indikator IKM juga masih belum mencapai target karena dari 9 unsur penilaian masih terdapat satu unsur yang masuk dalam prioritas utama perbaikan yaitu unsur produk spesifikasi jenis layanan.

Sementara itu, terdapat satu indikator yaitu Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menunggu rilis dari BPS Kab. Tuban. Sedangkan indikator Nilai Tambah Produk Unggulan Pertanian-Padi tercapai sesuai target di angka 7.000 rupiah. Dan 3 indikator lainnya dapat melampaui target yaitu Nilai Tukar Petani dengan capaian 102,17% yang dipengaruhi oleh adanya peningkatan NTP per sub sektor. Indikator Nilai Tambah Produk Perikanan mencapai 102,12% dikarenakan adanya peningkatan hasil produksi perikanan. Indikator Nilai Tambah Produk Unggulan Peternakan-Sapi juga mencapai 102,08%, adanya pelatihan Juleha (Juru SEmbelih Halal) yang diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban dapat meningkatkan animo masyarakat untuk membeli daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).

Tuban, 6 Januari 2026

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN



ENO JULIANTO, S.STP M.M

NIP. 19660721 198602 1 003

BERITA ACARA RAPAT EVALUASI CAPAIAN LKJIP TAHUN 2025
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TUBAN

Pada Hari Selasa tanggal 6 Januari 2026 telah dilakukan evaluasi laporan Penyusun LKjIP Tahun 2025 di Ruang Pertemuan Kepala DKP2P Lantai I dengan pimpinan Rapat Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dengan Peserta sebanyak 12 orang pejabat struktural dan JF yang disetarakan

Hasil / Kesimpulan :

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi tahun 2025*)	% Capaian
	Tujuan : Meningkatnya ketahanan pangan serta kesejahteraan petani dan nelayan	Indeks Ketahanan Pangan	86,41	73,23	84,75
		Nilai Tukar Petani	116,48	119,01	102,17
		Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,19	2,18 *)	
	Sasaran : Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian dan perikanan serta kemandirian pangan	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU)	6,99	7,02	99,57
		Nilai Tambah Produk Perikanan (Rupiah)	26.000	26.550	102,12
		Nilai Tambah Produk Unggulan Pertanian-Padi (Rupiah)	7.000	7.000	100
		Nilai Tambah Produk Unggulan Peternakan-Sapi (Rupiah)	36.750	37.516	102,08
	Sasaran: Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,73	87,07	99,25

Dari hasil analisa terhadap capaian kinerja dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan pada tahun 2025 terdapat 3 (tiga) indikator kinerja utama yang masih belum mampu mencapai target yaitu, jumlah populasi ternak, Skor PPH konsumsi dan skor PPH ketersediaan. Belum tercapainya angka jumlah produksi unggulan pertanian dikarenakan adanya pandemic penyakit mulut dan kuku (PMK) dan LSD pada hewan ternak terutama sapi yang merupakan wabah Nasional juga menyebabkan turunnya populasi ternak. Dari penurunan jumlah produksi baik pertanian maupun ternak juga berdampak pada tingkat ketersediaan pangan di masyarakat.

Sedangkan 4 (empat) indikator lainnya yaitu jumlah produksi unggulan pertanian, jumlah total produksi perikanan, nilai tambah produksi perikanan, serta produktivitas tanaman per hektar per tahun mampu mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini dikarenakan adanya kerjasama antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal maupun dengan pihak lainnya.

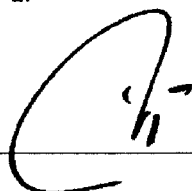
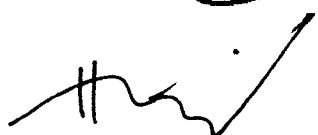
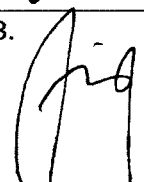
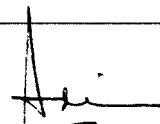
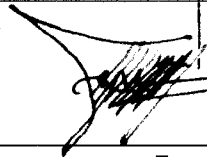
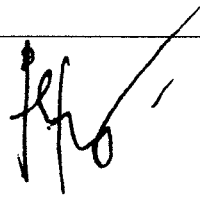
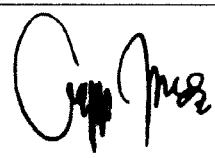
Tuban, 6 Januari 2026

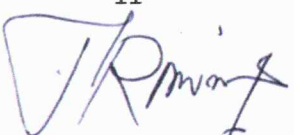
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN



EKO JULIANTO, S.STP M.M
NIP. 19660721 198602 1 003

DAFTAR HADIR RAPAT EVALUASI CAPAIAN LKIP Tahun 2025
Selasa , 6 Januari 2026

NO	PENANGGUNG JAWAB	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1	EKO JULIANTO, S.STP M.M	L	KEPALA DINAS	1. 
2	HART NOVEMBRIA S. S,Pt. M.Ling	L	SEKRETARIS DINAS	2. 
3	SRI YUNIATI, S.Pt, M.Ling	P	KEPALA BIDANG PENYULUHAN DAN PRASARANA PERTANIAN	3. 
4	SUBRIHANDOYO, S.Hut. MP	L	JF Analis Prasarana Dan Sarana Pertanian Ahli Muda	4. 
5	Drh. PIPIN DIAH LARASATI, M.A.P	P	KEPALA BIDANG KESEHATAN HEWAN	5. 
6	drh. MALIK CHOIRUL RACHMAN	L	KA. UPTD RUMAH POTONG HEWAN	6. 
7	drh. ELIZABETH SEPTI KUSUMANINGTYAS	P	JF MEDIK VETERINER AHLI MUDA	7. 
8	ENY DWI SULISTYOWATI SUSAN, S.Pt	P	JF PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI MUDA	8. 
9	TETI HARIYATI, S.Pt	P	JF ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI MUDA	
10	LINGGO INDARTO, SST	L	KABID PERIKANAN	10 

NO	PENANGGUNG JAWAB	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
11	WIWIN RISTA KUSWANTI,SP	P	JF ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI MUDA	11 
12	HERI PRAMONO, SP	L	JF PERENCANA AHLI MUDA	12 

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN



EKO JULIANTO, S.STP M.M
NIP. 19771001 199701 1 001

DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI CAPAIAN KINERJA LKJIP 2024

Selasa , 6 Januari 2026

